

- b. Permasalahan teknis
 - a) Permintaan masyarakat terhadap komoditi kebutuhan bahan pokok, barang penting dan barang strategis lainnya pada saat tertentu seperti hari-hari besar nasional cenderung melonjak yang tidak diimbangi oleh persediaan stok barang yang cukup sehingga menyebabkan kenaikan harga.
 - b) Masih rendahnya daya saing komoditi ekspor daerah.
 - c) Perlindungan Konsumen dan Pengawasan barang beredar belum optimal.
 - d) Kualitas SDM pengelola koperasi relatif masih rendah
 - e) Kemampuan untuk mengakses modal utamanya pada perbankan masih lemah
 - f) Partisipasi Anggota Pada Koperasi Relatif masih rendah
Partisipasi anggota pada koperasi masih rendah, utamanya pada kesadaran anggota untuk menabung pada koperasi.

2.3.3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Milenium Development Goals)

Pencapaian visi dan misi Dinas Perindustrian Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi UKM sebagai penjabaran dari visi misi Bupati Kapuas tahun 2013-2018 akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian visi Kabupaten Kapuas yaitu **“TERWUJUDNYA KABUPATEN KAPUAS YANG LEBIH MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI MELALUI PEMBANGUNAN YANG ADIL DAN MERATA SERTA BERKELANJUTAN”**

Target penanggulangan kemiskinan secara nasional, sesuai arahan Propenas (2015–2019), adalah mengurangi jumlah penduduk miskin dari 11,1 persen pada 2015 menjadi 7-8 persen pada 2019. Target itu dicapai melalui dua strategi. Pertama, meningkatkan pendapatan melalui perluasan peluang usaha, kesempatan kerja, dan peningkatan produktivitas penduduk miskin. Kedua, mengurangi pengeluaran keluarga miskin untuk pangan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Adapun kebijakan utamanya adalah perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan perlindungan sosial.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani MDGs, juga berkomitmen mewujudkan delapan tujuan tersebut sebagai perwujudan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kualitas hidup lebih baik. Secara nasional, komitmen tersebut dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan nasional, antara lain dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014. Lalu, dipertegas pada RPJMN 2015-2019.

Dari delapan tujuan MDGs yang akan dicapai, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM memiliki kewenangan menangani poin 1. Untuk MDGs pertama, menanggulangi kemiskinan dan kelaparan.

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Adapun tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

- 1) Masih kurangnya aparat pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas yang memiliki SDM berkualitas.
- 2) Kerjasama antar bidang masih lemah didalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas
- 3) Keterbatasan tenaga fungsional dibidang perdagangan, industri, koperasi dan UKM dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan, penyuluhan kepada masyarakat maupun kepada pelaku perdagangan, industri, koperasi dan UKM
- 4) Sikap kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam berusaha relatif lemah,

Peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

- 1) Kebijakan Pemerintah Pusat dibidang perdagangan, industri, koperasi dan UKM yang bersifat normative maupun dukungan finansial dalam pelaksanaan program pembangunan perdagangan, industri, koperasi dan UKM di daerah,
- 2) Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi, iklim usaha dan kemudahan bagi para investor serta kepedulian yang tinggi terhadap keberadaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM),
- 3) Potensi sumber daya alam yang memadai,
- 4) Adanya kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain dalam bidang ekonomi perdagangan dan investasi baik secara bilateral maupun multilateral dapat mempertahankan pangsa pasar produk menembus pasar global,
- 5) Kesadaran yang tinggi dari masyarakat Kapuas untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor dari luar.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan.

Kebijakan pemerintah yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Oleh karena itu untuk melaksanakan pembangunan dibidang Perdagangan, industri, Koperasi dan UKM di Kabupaten Kapuas maka perlu didukung oleh struktur organisasi kelembagaan dinas yang dinamis. Dalam hal ini pemberdayaan Perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (*pro poor*). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (*pro growth*). Keberadaan Koperasi dan UKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subjek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*).

Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UKM diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri. Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan UKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kokoh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperas dan UKM merupakan leader perekonomian Indonesia. Ia menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Disisi lain untuk mempercepat proses industrialisasi, menjawab tantangan dari dampak negatif gerakan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia, serta mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, pembangunan industri

Kabupaten Kapuas memerlukan arahan dan dukungan kebijakan serta bantuan pendanaan pemerintah pusat. Dalam melaksanakan proses pembangunan industri, keadaan tersebut merupakan kenyataan yang harus dihadapi serta harus menjadi pertimbangan yang menentukan dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan, sekaligus merupakan paradigma baru yang harus dihadapi oleh negara manapun dalam melaksanakan proses industrialisasi negaranya. Kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan daerah akan bangun industri yang kuat dalam jangka menengah, maupun jangka panjang mampu memberikan *multiplier effect* tidak hanya pada penyerapan tenaga kerja maupun *value added* pada hasil pengolahan hulu komoditi unggulan akan tetapi juga akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan perekonomian nasional.

Dari sisi perdagangan, tahun 2015 tepatnya 31 Desember merupakan awal berlangsungnya Asean Economic Community (AEC) atau dalam bahasa Indonesia yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal ini secara sederhana dapat dikatakan sebagai kesepakatan negara-negara ASEAN dalam meningkatkan kerja sama bidang perekonomian yang bertujuan untuk menciptakan aliran bebas barang, jasa, dan tenaga kerja terlatih, serta aliran investasi yang lebih bebas. Lebih detail lagi dapat dikatakan bahwa tujuannya untuk menciptakan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, dimana terjadi *free flow* atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN. Melihat kondisi ini, Asean Economic Community (AEC) merupakan momen yang penting bagi Indonesia dan secara khusus bagi masyarakat Kabupaten Kapuas karena akan memberikan peluang kepada kita untuk memperluas pasar bagi produk-produk unggulan kita. Namun di lain pihak, pemberlakuan AEC juga akan menjadi tantangan mengingat penduduk Indonesia yang sangat besar tentunya akan menjadi tujuan pasar bagi produk-produk Negara ASEAN lainnya.

Rekomendasi yang dapat formulasikan berujuk pada isu tersebut antara lain :

- 1) Pengembangan UKM/IKM melalui Pemberdayaan Usaha Mikro dan Pengembangan kapasitas UKM serta Revitalisasi Industri Kecil Menengah.

- 2) Perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Industri yang berbasis komoditi unggulan wilayah untuk mendukung agribisnis.
- 3) Perkuatan kelembagaan koperasi dan peningkatan keaktifan koperasi dalam rangka pencapaian peningkatan jumlah koperasi yang berdaya saing.
- 4) Menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan usaha serta menjamin pelaku usaha dari praktek persaingan usaha yang tidak sehat.
- 5) Peningkatan daya saing produk unggulan daerah melalui pembinaan dan bantuan sarana produksi bagi pelaku usaha UKM/IKM.
- 6) Stabilitasasi harga bahan pokok dan barang strategis, pengembangan pasar tradisional dalam mendukung distribusi dan ketersediaannya.
- 7) Pengembangan dan perluasan pasar ekspor bagi komoditas unggulan dalam usaha meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 8) Peningkatan pemanfaatan dan pengolahan bahan baku komoditi unggulan dengan menggunakan teknologi tepat guna.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rancangan Rencana Kerja memuat informasi tentang Rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas; dan Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah berikut pendanaan indikatif.

Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan Rancangan Renja Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 8 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN KAPUAS

Hasil Analisis Kebutuhan											
Rancangan Awal RKPD						Rancangan Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuala Kapuas	Cakupan layanan perkantoran	94 %	952.411	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuala Kapuas	Cakupan layanan perkantoran	94 %	952.411	
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Kuala Kapuas	Jumlah surat terkirim	100	264.326	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Kuala Kapuas	Jumlah surat terkirim	100	264.326	
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan PNS	Kuala Kapuas	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik (bln)	12	90.000	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan PNS	Kuala Kapuas	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik (bln)	12	90.000	
	3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Kuala Kapuas	Jumlah aparatur yang memperoleh jasa jaminan pemeliharaan kesehatan (Org)	-	-	3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Kuala Kapuas	Jumlah aparatur yang memperoleh jasa jaminan pemeliharaan kesehatan (Org)	6	-	
	4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kuala Kapuas	Jumlah jenis kendaraan dinas yang disediakan pemeliharannya (R4=1, R2=8 unit)	100 %	70.175	4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kuala Kapuas	Jumlah jenis kendaraan dinas yang disediakan pemeliharannya (R4=1, R2=8 unit)	100 %	70.175	
	5 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kuala Kapuas	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan (bln)	12	20.000	5 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kuala Kapuas	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan (bln)	12	20.000	
	6 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kuala Kapuas	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (bln)	12	29.717	6 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kuala Kapuas	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (bln)	12	29.717	
	7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kuala Kapuas	Jumlah peralatan yang diperbaiki	-	-	7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kuala Kapuas	Jumlah peralatan yang diperbaiki	20	-	
	8 Penyediaan alat tulis kantor (ATK)	Kuala Kapuas	Jumlah dan jenis ATK yang disediakan (Paket)	1	55.214	8 Penyediaan alat tulis kantor (ATK)	Kuala Kapuas	Jumlah dan jenis ATK yang disediakan (Paket)	1	55.214	

Rancangan Rencana Kerja

Tahun 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kuala Kapuas	Jumlah dan jenis cetak penggandaan (paket)	1	22.000	9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kuala Kapuas	Jumlah dan jenis cetak penggandaan (paket)	1	22.000
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kuala Kapuas	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik yang disediakan (paket)	1	5.809	10	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kuala Kapuas	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik yang disediakan (paket)	1	5.809
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kuala Kapuas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	1	-	11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kuala Kapuas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	1	-
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kuala Kapuas	Jumlah dan jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (ekspl)	24	6.000	12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kuala Kapuas	Jumlah dan jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (ekspl)	36	6.000
13	Penyediaan makanan dan minuman	Kuala Kapuas	Jumlah pegawai yang disediakan makanan dan minuman (org)	70	79.170	13	Penyediaan makanan dan minuman	Kuala Kapuas	Jumlah pegawai yang disediakan makanan dan minuman (org)	55	79.170
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi/Konsultasi keluar daerah (kali)	40	250.000	14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi/Konsultasi keluar daerah	20	250.000
15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten Kapuas	Jumlah rapat koordinasi dan kunjungan kerja (kali)	30	60.000	15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten Kapuas	Jumlah rapat koordinasi dan kunjungan kerja (kali)	30	60.000
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kuala Kapuas	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	341.000	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Kuala Kapuas	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	341.000
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kuala Kapuas	Jumlah dan jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	40.000	2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kuala Kapuas	Jumlah dan jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor	1	40.000
2	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Kuala Kapuas	Pemeliharaan gedung kantor (paket)	1	85.000	3	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Kuala Kapuas	Pemeliharaan gedung kantor (paket)	1	85.000
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kuala kapuas	Jumlah dan jenis peralatan yang disediakan pemeliharannya (paket)	1	25.000	6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kuala kapuas	Jumlah dan jenis peralatan yang disediakan pemeliharannya (paket)	1	25.000
4	Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair	Kuala Kapuas	Jumlah dan jenis meubelair yang disediakan pemeliharannya (paket)	1	1.000	7	Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair	Kuala Kapuas	Jumlah dan jenis meubelair yang disediakan pemeliharannya (paket)	1	1.000

Rancangan Rencana Kerja

Tahun 2018

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	Program Peningkatan Displin Aparatur	Kuala Kapuas	Jumlah pelanggaran pegawai negeri sipil	0 %	37.200	Program Peningkatan Displin Aparatur	Kuala Kapuas	Jumlah pelanggaran pegawai negeri sipil	0 %	37.200	
	I Pengadaan pakaian khusus beserta perlengkapannya	Kuala Kapuas	Jumlah pakaian dinas yang disediakan (org)	62	37.200	I Pengadaan pakaian khusus beserta perlengkapannya	Kuala Kapuas	Jumlah pakaian khusus yang disediakan (org)	62	37.200	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar dan dalam daerah	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	95 %	100.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar dan dalam daerah	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	95 %	100.000	
IV	I Pendidikan dan Pelatihan Formal	Luar dan dalam daerah	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (org)	20	100.000	I Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Luar dan dalam daerah	Jumlah peserta yang mengikuti bintek (org)	20	100.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kuala Kapuas	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	20.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kuala Kapuas	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	20.000	
	I Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kuala Kapuas	Jumlah laporan capaian kinerja	85 %	5.000	I Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kuala Kapuas	Jumlah laporan capaian kinerja	85 %	5.000	
	2 Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kuala Kapuas	Jumlah laporan capaian keuangan semesteran	85 %	5.000	2 Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kuala Kapuas	Jumlah laporan keuangan semesteran	85 %	5.000	
	3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kuala Kapuas	Jumlah laporan capaian prognosis realisasi anggaran	85 %	5.000	3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kuala Kapuas	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	85 %	5.000	
VI	4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kuala Kapuas	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	85 %	5.000	4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kuala Kapuas	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	85 %	5.000	
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Kabupaten Kapuas	Persentase UMKM yang aktif	91 %	80.000	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Kabupaten Kapuas	Persentase UMKM yang aktif	91 %	80.000	
	I Penyusunan kebijakan tentang UKM	Kabupaten Kapuas	Tersedianya data WUB (bin)	12	80.000	I Penyusunan kebijakan tentang UKM	Kabupaten Kapuas	Tersedianya data WUB (bin)	12	80.000	

Rancangan Rencana Kerja

Tahun 2018

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Kabupaten Kapuas	Cakupan UMKM binaan	91 %	165.000	Program Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Kabupaten Kapuas	Cakupan UMKM binaan	91 %	165.000	
	1 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Dalam dan luar daerah	Tertaksananya kegiatan temu usaha UMKM dengan usaha besar dan atau investor (kali)	1	30.000	1 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Kabupaten Kapuas	Tertaksananya kegiatan temu usaha UMKM dengan usaha besar dan atau investor	1	30.000	
	2 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Luar Daerah	Jumlah pameran yang diikuti (kali)	2	60.000	2 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Luar Daerah	Jumlah pameran yang diikuti (kali)	1	60.000	
	3 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Kabupaten Kapuas	Jumlah WUB yang terlatih	90	75.000	3 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Kabupaten Kapuas	Jumlah WUB yang terlatih	25	75.000	
VIII	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Kabupaten Kapuas	Jumlah dana yang disalurkan Pemerintah bagi UMKM (Rp. Milyar)	75.000.000	120.000	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Dalam dan luar daerah	Jumlah dana yang disalurkan Pemerintah bagi UMKM (Rp. Milyar)	75.000.000	120.000	
	1 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Kabupaten Kapuas	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan (kali)	1	25.000	1 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Kabupaten Kapuas	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan (kali)	-	25.000	
	2 Pengembangan klaster bisnis	Kabupaten Kapuas	Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	1	35.000	2 Pengembangan klaster bisnis	Kabupaten Kapuas	Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	1	35.000	
	3 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UKM dan koperasi	Kabupaten Kapuas	Jumlah rapat koordinasi dan kunjungan kerja (ta)	1	30.000	3 Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah	Kabupaten Kapuas	Jumlah rapat koordinasi dan kunjungan kerja (ta)	1	30.000	
	4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Kapuas	Jumlah monitoring yang dilaksanakan (bln)	12	30.000	4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Kapuas	Jumlah monitoring yang dilaksanakan (bln)	12	30.000	
IX	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Kabupaten Kapuas	Persentase koperasi aktif	95 %	275.000	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Kabupaten Kapuas	Persentase koperasi aktif	95 %	275.000	
	1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Kabupaten Kapuas	Jumlah rapat koordinasi dan kunjungan kerja (ta)	1	30.000	1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Kabupaten Kapuas	Jumlah rapat koordinasi dan kunjungan kerja (ta)	1	30.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Kabupaten Kapuas	Jumlah kegiatan pelatihan	2	160.000	2	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Jumlah kegiatan pelatihan	2	160.000	
3	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Kabupaten Kapuas	Jumlah KSP/USP-Kop yang dibina dan diawasi	20 KSP/ USP- KOP	30.000	3	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah KSP/USP-Kop yang dibina dan diawasi	20 KSP/ USP- KOP	30.000	
4	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Kabupaten Kapuas	Jumlah koperasi yang dibubarkan	5	25.000	4	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Jumlah peserta sosialisasi	5	25.000	
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Kapuas	Jumlah KSP/USP-Kop yang dibina dan diawasi	20 KSP/ USP- KOP	30.000	5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah KSP/USP-Kop yang dibina dan diawasi	20 KSP/ USP- KOP	30.000	
X	Program Perindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Kabupaten Kapuas	Persentase komoditas perdagangan	80 %	150.000		Program Perindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase komoditas perdagangan	80 %	150.000	
1	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Luar daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diikuti (ta)	1	30.000	1	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Jumlah rapat koordinasi yang diikuti (ta)		30.000	
2	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Kabupaten Kapuas	Jumlah pengawasan yang dilaksanakan (bin)	12	20.000	3	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah pengawasan yang dilaksanakan (bin)	12	20.000	
3	Operasionalisasi dan pengembangan kemetropolitan daerah	Kecamatan Selat	Jumlah pelayanan tera dan tera ulang (kali)	1	100.000	4	Operasionalisasi dan pengembangan kemetropolitan daerah	Jumlah pelayanan tera dan tera ulang (kali)	1	100.000	
	- Kegiatan tera ulang alat ukur takar timbang dan kelengkapannya						- Kegiatan tera ulang alat ukur takar timbang dan kelengkapannya				
XI	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Kabupaten Kapuas	Ekspor bersih perdagangan (US\$)	45.000	540.000		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Ekspor bersih perdagangan (US\$)	45.000	540.000	
1	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Kabupaten Kapuas	Jumlah pameran yang dilaksanakan (kali)	3	510.000	1	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Jumlah pameran yang dilaksanakan (kali)	3	510.000	
	- Pameran hari jadi Kapuas	Kapuas		1	110.000		- Pameran hari jadi Kapuas		1	110.000	
	- Pameran Kalteng Expo	Palangka Raya		1	250.000		- Pameran Kalteng Expo		1	250.000	
	- Pameran Festival Borneo	Luar Daerah		1	150.000		- Pameran Festival Borneo		1	150.000	

1	2		3	4		5	6	7		8	9	10	11	12
	2	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perdagangan	Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan (ta)	1	30.000	3	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perdagangan	Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan (ta)	1	30.000		
XII	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		Kabupaten Kapuas	Persentase laju pertumbuhan perdagangan dalam negeri	80 %	2.641.300	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		Kabupaten Kapuas	Persentase laju pertumbuhan perdagangan dalam negeri	80 %	2.591.390		
	1	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Kab. Kapuas	Jumlah peserta sosialisasi	30	30.000	1	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Kab. kapuas	Jumlah peserta sosialisasi	30	30.000		
	2	Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk (DAK)	Kabupaten Kapuas	Jumlah pasar yang dibangun	1	861.300	2	Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk	Kabupaten Kapuas	Jumlah pasar yang dibangun	1	861.300		
	3	Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk (APBD)	Kabupaten Kapuas	Jumlah pasar yang dibangun/revitalisasi	2	1.050.000	3	Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk	Kabupaten Kapuas	Jumlah pasar yang dibangun/revitalisasi	2	1.050.000		
	4	Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk	Kabupaten Kapuas	Jumlah kegiatan pasar penyeimbang harga yang dilaksanakan	2	700.000	4	Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk	Kabupaten Kapuas	Jumlah kegiatan pasar penyeimbang harga yang dilaksanakan		700.000		
XIII	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi		Kabupaten Kapuas	Persentase industri berbasis teknologi	20 %	65.000	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi		Kabupaten Kapuas	Persentase industri berbasis teknologi	20 %	65.000		
	1	Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi	Kab. Kapuas dan Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi (ta)	1	20.000	1	Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi	Kab. Kapuas dan Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi (ta)	1	20.000		
	2	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Selat	Jumlah pelaksanaan lomba (keg)	1	45.000	2	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Selat	Jumlah pelaksanaan lomba (keg)	1	45.000		

Rancangan Rencana Kerja

Tahun 2018

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XIV	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		Kabupaten Kapuas	Persentase produktivitas industri kecil dan menengah	80 %	180.000	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kabupaten Kapuas	Persentase produktivitas industri kecil dan menengah	80 %	180.000	
	1	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri - Pameran Dekranasda - Pameran dagang dan gelar dagang BBGRM dan HKG-PKK - Pameran MTQ - Pameran Pespawati	Kab. Kapuas	Jumlah kegiatan pameran yang dilaksanakan (keg)	4	160.000	1	Kab. Kapuas	Jumlah kegiatan pameran yang dilaksanakan (keg)	4	160.000	
						45.000					45.000	
						65.000					65.000	
						25.000					25.000	
						25.000					25.000	
	2	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah	Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan Rapat teknis (ta)	1	20.000	2	Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan Rapat teknis (ta)	1	20.000	
XV	Program peningkatan kemampuan teknologi industri		Kabupaten Kapuas	Persentase industri yang menerapkan SNI	11 %	40.000	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Kabupaten Kapuas	Persentase industri yang menerapkan SNI	11 %	40.000	
	1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Kab. Kapuas	Jumlah pengrajin yang terlatih	30	40.000	1	Kab. Kapuas	Jumlah pengrajin yang terlatih	30	40.000 <td></td>	
XVI	Program pengembangan sentra industri potensial		Kabupaten Kapuas	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana sentra industri	83 %	600.000	Program pengembangan sentra industri potensial	Kabupaten Kapuas	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana sentra industri	83 %	600.000	
	1	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Kab. Kapuas	Jumlah gedung sentra yang dibangun	1	600.000	1	Kab. Kapuas	Jumlah gedung sentra yang dibangun	1	600.000	
Jumlah					6.117.000		6.117.000					

Rancangan Rencana Kerja

Tahun 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XV	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Kabupaten Kapuas	Persentase industri yang menerapkan SNI	11 %		Program peningkatan teknologi industri	Kabupaten Kapuas	Persentase industri yang menerapkan SNI	11 %		
	I Pembinaan kemampuan teknologi industri	Kab. Kapuas	Jumlah pengrajin yang terlatih	30	40.000	I Pembinaan teknologi industri	Kab. Kapuas	Jumlah pengrajin yang terlatih	30	40.000	
XVI	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Kabupaten Kapuas	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana sentra industri	83 %		Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Kabupaten Kapuas	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana sentra industri	83 %		
	I Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Kab. Kapuas	Jumlah gedung sentra yang dibangun	I	418.010	I Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Kab. Kapuas	Jumlah gedung sentra yang dibangun	I	418.010	
Jumlah					6.117.000						6.117.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui proses Musrenbang sesuai dengan tahapan serta dengan mencermati program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Renstra SKPD. Tahapan selanjutnya adalah perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan monitoring yang menurut aturan dan ketentuan termasuk kemungkinan pelibatan unsur/pihak ketiga termasuk jasa konsultasi serta rekanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 9 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2018 KABUPATEN KAPUAS

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan los pasar desa RT 05	Desa mawar mekar Kec. Pulau Petak	Jumlah pasar yang dibangun	1 unit	
2	Pembangunan pasar	Palangkau lama Kec. Kapuas Murung	Jumlah pasar yang dibangun	1 unit	
3	Pelatihan kue basah dan kering	Kecamatan Kapuas Murung	Jumlah peserta pelatihan	25 org	
4	Pelatihan keterampilan dan kerajinan tangan	Kec. Kapuas Murung	Jumlah peserta pelatihan	25 org	Masuk dalam Renja 2018
5	Pembangunan pasar	Desa Dadahup Raya Kec. Dadahup	Jumlah pasar yang dibangun	1 unit	
6	Pembangunan pasar	Desa Sumber Alaska Kec. Dadahup	Jumlah pasar yang dibangun	1 unit	
7	Pembangunan kantin pasar	Desa Bungai Jaya Kec. Basarang	Jumlah pasar yang dibangun	1 unit	
8	Rehab bangunan pasar	Desa Lunuk Ramba Kec. Basarang	Jumlah pasar rehab	4 unit	
9	Bantuan dan permodalan (koperasi)	Desa Pangkalan Sari Kec. Basarang	Jumlah koperasi yang mendapat bantuan	2 Kop	
10	Pembangunan pasar desa	Desa Maju Bersama Kec. Kapuas Barat	Jumlah pasar yang dibangun	1 unit	
11	Pembangunan pasar desa	Desa Teluk Hiri Kec. Kapuas Barat	Jumlah pasar yang dibangun	1 unit	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Pembangunan pasar desa	Desa Sei Kayu Kec. Kapuas Barat	Jumlah pasar yang dibangun	1 unit	
13	Pembangunan pasar desa	Desa Penda Katapi Kec. Kapuas Barat	Jumlah pasar yang dibangun	1 unit	
14	Pelatihan kerajinan rotan dan hasil hutan lainnya	Desa Katimpun Kec. Mantangai	Jumlah peserta pelatihan	30 org	Masuk dalam Renja 2018
15	Penyertaan modal kelompok kerajinan tangan	Desa Lamunti Permai (A-1) Kec. Mantangai	Jumlah kelompok yang menerima bantuan	1 kel	
16	Pembentukan KUD	Desa Sumber Makmur Kec. Mantangai	Jumlah KUD yang dibentuk	1 unit	
17	Pembangunan pasar desa	Desa Tumbang Manyarung RT 2 Kec. Mandau Talawang	Jumlah pasar yang dibangun	1 unit	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. SEKTOR INDUSTRI

a. Arah dan Kebijakan Industri Nasional

Kemampuan industri mikro dan kecil belum memadai untuk dapat digunakan basis penumbuhan populasi industri berskala besar dan sedang. Padahal, untuk dapat meningkatkan produktivitas industri nasional salah satu jalan adalah dengan menumbuhkan industri yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Sehingga pengungkit utama akselerasi pertumbuhan industri adalah investasi baik dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) ataupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Oleh karena itu, arah kebijakan pertama adalah menarik investasi industri dengan menyediakan tempat industri tersebut dibangun, dalam arti tempat yang seluruh sarana prasarana yang dibutuhkan telah tersedia. Setelah itu baru kebijakan yang menyangkut arah penumbuhan populasi tersebut serta arah peningkatan produktivitasnya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 tertuang arah kebijakan pembangunan industri adalah sebagai berikut:

- 1) **Pengembangan Perwilayahan Industri** di luar Pulau Jawa: (1) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terutama yang berada dalam Koridor ekonomi ; (2) Kawasan Peruntukan Industri ; (3) Kawasan Industri; (4) Sentra IKM; (5) Kawasan Ekonomi Khusus; (6) Kawasan Berikat / *Export Processing Zone* (EPZ); (7) Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ).

Strategi pengembangan perwilayahan industri adalah:

- a) Memfasilitasi pembangunan 13 Kawasan Industri (KI) yang mencakup: (1) Bintuni - Papua Barat; (2) Buli - Halmahera Timur-Maluku Utara; (3) Bitung – Sulawesi Utara, (4) Palu - Sulawesi Tengah; (5) Morowali - Sulawesi Tengah; (6) Konawe – Sulawesi Tenggara; (7) Bantaeng - Sulawesi Selatan; (8) Batulicin - Kalimantan Selatan; (9) Ketapang - Kalimantan Barat; (10) Landak – Kalimantan Barat, (11) Kuala Tanjung, Sumatera Utara, (12) Sei Mangke – Sumatera Utara; dan (13) Tanggamus, Lampung.
- b) Membangun Satu Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa.
- c) Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang terdiri dari 11 di Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur), dan 11 di Kawasan Barat Indonesia.
- d) Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur utama (jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pengolahan limbah,

dan logistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan (*Quality Working Life*) bagi pekerja.

- 2) **Penumbuhan Populasi Industri** dengan menambah paling tidak sekitar **9 ribu usaha** industri berskala besar dan sedang dimana 50% tumbuh di luar Jawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribu unit usaha.

Strategi utama penumbuhan populasi adalah dengan mendorong investasi baik melalui penanaman modal asing maupun modal dalam negeri, yang terdiri dari:

- a) Mendorong investasi untuk industri pengolah sumber daya alam, baik hasil pertanian maupun hasil pertambangan (hilirisasi), yaitu industri pengolah:
 - (i) Hasil-hasil **pertanian**/perkebunan yang mencakup industri pengolah minyak sawit (oleokimia), industri karet dan produk karet, industri cokelat, industri pangan, bahan penyegar, pakan, serta industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan lainnya.
 - (ii) Produk turunan **Migas** (petrokimia) yang mencakup industri petrokimia hulu, kimia organik, pupuk, garam, semen, resin sintetis dan bahan plastik, karet sintetis, serat tekstil, kimia penunjang pertahanan, plastik dan karet hilir, farmasi dan obat-obatan;
 - (iii) Mineral hasil **pertambangan** yang mencakup industri pengolahan dan pemurnian besi baja dasar, pengolahan dan pemurnian bukan besi (aluminium, tembaga, dan nikel), pembentukan logam (*metal forming*), logam untuk industri strategis, pengolahan logam tanah jarang (*rare earth metal*)
- b) Barang konsumsi kebutuhan dalam negeri yang utamanya industri padat tenaga kerja: industri mesin – permesinan, tekstil dan produk tekstil, alat uji dan kedokteran, alat transportasi, kulit dan alas kaki, alat kelistrikan, elektronika dan telematika.
- c) Penghasil bahan baku, bahan setengah jadi, komponen, dan sub-assembly (pendalaman struktur).
- d) Memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global baik sebagai perusahaan *subsidiary*, *contract manufacturer*, maupun sebagai *independent supplier* (*Integrasi ke Global Production Network*).
- e) Pembinaan industri kecil dan menengah (**Pembinaan IKM**) agar dapat terintegrasi dengan rantai nilai industri pemegang merek (*Original Equipment*

Manufacturer, OEM) di dalam negeri dan dapat menjadi basis penumbuhan populasi industri besar dan sedang.

Kebijakan investasi akan diarahkan untuk mengurangi efek negatif dominasi PMA dalam perekonomian nasional.

- 3) **Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas** (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja) dengan strategi sebagai berikut:
- a) Peningkatan Efisiensi Teknis
 - (i) Pembaharuan / revitalisasi permesinan industri
 - (ii) Peningkatan dan pembaharuan keterampilan tenaga kerja
 - (iii) Optimalisasi ke-ekonomian lingkup industri (*economic of scope*) melalui pembinaan klaster industri
 - b) Peningkatan Penguasaan Iptek / Inovasi
 - (i) Infrastruktur mutu (*measurement, standardization, testing, and quality*)
 - (ii) Layanan perekayasa dan teknologi
 - (iii) Penyelenggaraan riset dan pengembangan teknologi
 - (iv) Penumbuhan entrepreneur berbasis inovasi teknologi (teknopreneur)
 - c) Peningkatan Penguasaan dan Pelaksanaan Pengembangan Produk Baru (*New Product Development*) oleh industri domestik.
 - d) Pembangunan Faktor Input
 - (i) Peningkatan kualitas SDM Industri
 - (ii) Akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau

Fasilitasi dan insentif dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas diutamakan industri: (1) strategis; (2) maritim; dan (3) padat tenaga kerja. Kebijakan fiskal terhadap impor bahan baku, komponen, barang setengah jadi diharmonisasikan sesuai dengan rantai pertambahan nilai berikutnya di dalam negeri.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian

- 1) Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa: (a) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terutama yang berada dalam Koridor ekonomi;

- (b) Kawasan Peruntukan Industri; (c) Kawasan Industri; dan (d) Sentra IKM. Strategi pengembangan perwilayahan industri adalah:
- a. Memfasilitasi pembangunan 14 Kawasan Industri (KI) yang mencakup: (i) Bintuni - Papua Barat; (ii) Buli - Halmahera Timur-Maluku Utara; (iii) Bitung - Sulawesi Utara, (iv) Palu - Sulawesi Tengah; (v) Morowali - Sulawesi Tengah; (vi) Konawe - Sulawesi Tenggara; (vii) Bantaeng - Sulawesi Selatan; (viii) Batulicin - Kalimantan Selatan; (ix) Jorong - Kalimantan Selatan; (x) Ketapang - Kalimantan Barat; (xi) Landak - Kalimantan Barat, (xii) Kuala Tanjung, Sumatera Utara, (xiii) Sei Mangke - Sumatera Utara; dan (xiv) Tanggamus, Lampung.
 - b. Membangun paling tidak satu kawasan industri di luar Pulau Jawa.
 - c. Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang terdiri dari 11 di Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur), dan 11 di Kawasan Barat Indonesia.
 - d. Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur utama (jalan, listrik, air minum, telekomunikasi, pengolahan limbah, dan logistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan (*Quality Working Life*) bagi pekerja.
- 2) Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha industri berskala besar dan sedang dimana 50 persen tumbuh di luar Jawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribu unit usaha. Strategi utama penumbuhan populasi adalah dengan mendorong investasi baik melalui penanaman modal asing maupun modal dalam negeri, terutama pada:
- a. Industri pengolah sumber daya alam, yaitu industri pengolah :
 - i. Hasil-hasil pertanian/perkebunan yang mencakup industri pengolah minyak sawit (oleokimia), kemurgi, industri karet dan produk karet, industri cokelat, industri pangan termasuk industri gula, bahan penyegar, pakan, serta industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan lainnya.
 - ii. Produk turunan Migas (petrokimia) yang mencakup industri petrokimia hulu, kimia organik, pupuk, garam, semen, resin sintetis dan bahan plastik,

- karet sintetik, serat tekstil, kimia penunjang pertahanan, plastik dan karet hilir, farmasi dan obat-obatan;
- iii. Mineral hasil pertambangan yang mencakup industri pengolahan dan pemurnian besi baja dasar, pengolahan dan pemurnian bukan besi (aluminium, tembaga, dan nikel), pembentukan logam, logam untuk industri strategis, pengolahan logam tanah jarang.
- b. Industri penghasil barang konsumsi kebutuhan dalam negeri yang padat tenaga kerja: industri mesin – permesinan, tekstil dan produk tekstil, alat uji dan kedokteran, alat transportasi, kulit dan alas kaki, alat kelistrikan, elektronika dan telematika.
- c. Industri penghasil bahan baku, bahan setengah jadi, komponen, dan *sub-assembly* (pendalaman struktur).
- d. Industri yang memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global baik sebagai perusahaan *subsidiary*, *contract manufacturer*, maupun sebagai pemasok independen (*Global Production Network*). Di samping itu, Industri Kecil dan Menengah (IKM) akan dibina agar dapat terintegrasi dengan rantai nilai industri pemegang merek (*Original Equipment Manufacturer, OEM*) di dalam negeri dan menjadi basis penumbuhan populasi industri besar/sedang.
- 3) Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja) dengan strategi sebagai berikut:
- a. Peningkatan Efisiensi Teknis
1. Pembaharuan/revitalisasi permesinan industri;
 2. Peningkatan dan pembaharuan keterampilan tenaga kerja;
 3. Optimalisasi keekonomian lingkup industri (*economic of scope*) melalui pembinaan klaster industri.
- b. Peningkatan Penguasaan Iptek/Inovasi
1. Infrastruktur mutu (*measurement, standardization, testing, and quality*);
 2. Layanan perekayasa dan teknologi;
 3. Penyelenggaraan riset dan pengembangan teknologi;
 4. Penumbuhan *entrepreneur* berbasis inovasi teknologi (*teknopreneur*).
- c. Peningkatan Penguasaan dan Pelaksanaan Pengembangan Produk Baru (*New Product Development*) oleh industri domestik.

d. Pembangunan Faktor Input

1. Peningkatan kualitas SDM Industri;
2. Akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau.

Fasilitasi dan pemberian insentif dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas diprioritaskan pada: (1) industri strategis menurut Kebijakan Industri Nasional; (2) industri maritim; dan (3) industri padat tenaga kerja. Kebijakan fiskal terhadap impor bahan baku, komponen, barang setengah jadi diharmonisasikan sesuai dengan rantai pertambahan nilai berikutnya di dalam negeri. pemegang merek (*Original Equipment Manufacturer*, OEM) di dalam negeri dan menjadi basis penumbuhan populasi industri besar / sedang.

3.1.2. SEKTOR PERDAGANGAN

a. Arah dan Kebijakan Nasional di Sektor Perdagangan

Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan akan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 serta bertumpu pada keseimbangan antara pembangunan perdagangan dalam negeri dan pembangunan perdagangan luar negeri. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang domestik serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

Pengembangan kapasitas perdagangan nasional dilakukan melalui dua pilar arah kebijakan, yaitu: (1) pengembangan perdagangan dalam negeri dan (2) pengembangan perdagangan luar negeri. Kedua kebijakan ini dilakukan secara sinergis dan inklusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berkeadilan.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menetapkan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan sektor perdagangan antara lain, yaitu perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan.

Arah kebijakan pembangunan Perdagangan Nasional kedepan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2015-2019. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun langkah-langkah strategis kedepan untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi 8 (delapan) pokok pikiran, yaitu :

- 1) Mengamankan pangsa ekspor dipasar utama
- 2) Memperluas pangsa pasar ekspor dipasar prospektif dan hubungan perdagangan internasional
- 3) Meningkatkan diversifikasi produk ekspor
- 4) Mengamankan pasar domestic untuk meningkatkan daya saing produk nasional
- 5) Meningkatkan aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- 6) Meningkatkan perlindungan konsumen
- 7) Meningkatkan efisiensi system distribusi dan logistic
- 8) Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha perdagangan

Prioritas Nasional Bidang Perdagangan Luar Negeri

Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun kedepan sesuai dengan yang tertuang didalam RPJMN 2015-2019 adalah “Meningkatkan daya saing produk ekspor non-migas dan jasa”

Strategi yang perlu dilakukan dalam pembangunan perdagangan luar negeri selama periode 2015-2019 adalah :

1. Menjaga dan meningkatkan pangsa pasar produk Indonesia dipasar ekspor utama (*market maintenance*).
2. Meningkatkan pangsa pasar ekspor dipasar prospektif (*market creation*).
3. Mengidentifikasi peluang pasar ekspor produk dan jasa potensial (*Product creation*)
4. Meningkatkan fasilitasi ekspor dan impor untuk mendukung daya saing produk nasional (*export facilitation and import management*)

Prioritas Nasional Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Arah kebijakan pembangunan perdagangan dalam neger dalam RPJMN 2015-2019 adalah : “Meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri yang lebih efisien dan berkeadilan”.

Strategi yang perlu dilakukan dalam periode 2015-2019 adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga.
2. Meningkatkan kualitas sarana perdagangan (terutama pasar rakyat)
3. Meningkatkan aktivitas perdagangan antar wilayah di Indonesia
4. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil menengah.
5. Meningkatkan iklim usaha perdagangan konvensional dan non konvensional.
6. Mendorong penggunaan produk domestik
7. Meningkatkan perlindungan konsumen
8. Menerapkan standar nasional Indonesia (SNI) secara konsisten
9. Meningkatkan efektivitas pengelolaan impor untuk menjaga stabilitas pasar domestik
10. Mendorong perdagangan berjangka komoditi
11. Mendorong pengembangan sistem resi gudang dan pasar lelang
12. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang perdagangan

3.1.3. SEKTOR KOPERASI UMKM

a. Arah dan Kebijakan Nasional di Sektor Koperasi

Berdasarkan sasaran pembangunan nasional periode 2015-2019, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional adalah :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan.
3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim.
5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.
7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koperasi dan UKM

Dengan memperhatikan tantangan dan sasaran pengembangan koperasi dan UMKM ke depan, dan merujuk pada arah kebijakan nasional dan di bidang UMKM dan koperasi tahun 2015-2019, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk:

“Meningkatkan produktivitas, kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar (“naik kelas”) dan berdaya saing”

Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui lima strategi sebagaimana dituangkan dalam RPJMN tahun 2015-2019 yaitu (i) peningkatan kualitas sumber daya manusia; (ii) peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; (iii) peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran; (iv) penguatan kelembagaan usaha; dan (v) kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja dari suatu organisasi.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Berdasarkan hal yang berpangkal kepada visi, misi dan faktor-faktor penentu keberhasilan yang telah digariskan maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan I :

Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta peran kelembagaan Dinas Perindagkop UMKM Kab. Kapuas. Ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia/aparatur
2. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja dan keuangan

Tujuan II :

Menumbuhkan kemitraan usaha bagi koperasi dan UMKM dalam daerah, luar daerah, dalam negeri dan luar negeri. Ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/besar dan IKM
2. Meningkatnya jumlah usaha kecil dan menengah

Tujuan III :

Meningkatkan daya saing pada era globalisasi dengan memantapkan kelembagaan, meningkatkan dan mengembangkan sistem pendukung usaha bagi KUKM. Ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan yang mempunyai peringkat A/sehat
2. Meningkatnya jumlah koperasi dan UKM yang menerima bantuan modal

Tujuan IV :

Mewujudkan kemitraan dengan lembaga swasta dan pelaku usaha yang sinergi dan berkesinambungan. Ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah dana yang disalurkan BPR/LKM/BUMN kepada koperasi dan UKM

Tujuan V :

Meningkatkan pengembangan industri kecil dan menengah yang menggunakan bahan baku produk lokal. Ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya industri pengguna bahan baku produk lokal
2. Meningkatnya volume, nilai dan jenis komoditi ekspor
3. Meningkatnya perijinan usaha
4. Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan konsumen

Tabel 10 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta peran kelembagaan Dinas Perindagkop UMKM Kab. Kapuas	1 Meningkatkan sumber daya manusia/aparaturn kompetensi	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	8	8	15	18	20
		2 Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen yang disusun	8	8	8	8	8
2	Menumbuhkan kemitraan usaha bagi koperasi dan UMKM dalam daerah, luar daerah, dalam negeri dan luar negeri.	1 Meningkatnya jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/besar dan IKM	Jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/besar dan IKM	5	10	15	20	25
		2 Meningkatnya jumlah usaha kecil dan menengah	Jumlah usaha kecil dan menengah	2078	2118	2159	2204	2255
3	Meningkatkan daya saing pada era globalisasi dengan memantapkan kelembagaan, meningkatkan dan mengembangkan pendukung usaha bagi KUKM	1 Bertambahnya jumlah koperasi aktif dan yang mempunyai peringkat A/sehat	Jumlah koperasi aktif yang mempunyai peringkat A/sehat	398	408	423	443	450
		2 Meningkatnya jumlah koperasi dan UMK yang menerima bantuan modal	Jumlah koperasi dan UMK yang menerima bantuan modal	30	35	40	50	60
4	Mewujudkan kemitraan dengan lembaga swasta dan pelaku usaha yang sinergi dan berkesinambungan	1 Meningkatnya jumlah dana yang disalurkan BPR/LKM/BUMN kepada koperasi dan UMK	Jumlah dana yang disalurkan BPR/LKM/BUMN kepada koperasi dan UMK meningkat	58.745.111	65.992.111	70.326.614	75.289.111	80.377.111

Rancangan Rencana Kerja

Tahun 2018

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Meningkatkan pengembangan industri kecil dan menengah yang menggunakan bahan baku produk lokal serta penataan struktur industri	1	Meningkatnya industri pengguna bahan baku produk lokal		252	260	267	267
			Jumlah industri menggunakan bahan baku produk lokal meningkat					
			Jumlah industri UKM meningkat	330	335	340	345	350
			Jumlah ijin industri meningkat	50	65	75	125	125
		2	Meningkatnya volume, nilai dan jenis komoditi ekspor	36.000.000,00	37.000.000,00	40.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00
			Nilai ekspor meningkat					
			Volume ekspor meningkat (Ton)	11.000	12.000	15.000	20.000	30.000
		3	Meningkatnya perijinan usaha					
			Jumlah ijin usaha meningkat	150	155	160	165	170
			Jumlah pedagang kecil menengah dan besar meningkat	150	155	160	165	170
		4	Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan konsumen					
			Jumlah pengawasan barang beredar	4	4	4	4	4

3.3. Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2017 nanti Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas merencanakan akan melaksanakan sebanyak 16 (enam belas) program yang didukung oleh 60 (enam puluh) kegiatan dengan rincian yaitu : 5 (lima) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan merupakan urusan rutin sedangkan 11 (sebelas) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan merupakan urusan pilihan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas. Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan di dukung 13 kegiatan, yaitu :

- 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
- 1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- 1.6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- 1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 1.8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 1.9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan;
- 1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- 1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan di Dukung 5 (lima) Kegiatan, yaitu :

- 2.1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 2.2 Pengadaan peralatan gedung kantor
- 2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- 2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- 2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler

3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur didukung 1 (satu) kegiatan, yaitu :**
 - 3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan di Dukung 1 (satu) Kegiatan, yaitu :**
 - 4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Anggaran dan Keuangan dengan di Dukung 4 (empat) Kegiatan, yaitu :**
 - 5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 5.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
 - 5.3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
 - 5.4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6. **Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah dan Koperasi yang Kondusif dengan di Dukung 1 (satu) Kegiatan, yaitu :**
 - 6.1 Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil dan menengah
7. **Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan di Dukung 3 (lima) Kegiatan, yaitu :**
 - 7.1 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - 7.2 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi;
 - 7.3 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
8. **Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah didukung 4 (empat) kegiatan, yaitu:**
 - 8.1 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan;
 - 8.2 Pengembangan klaster bisnis
 - 8.3 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah;
 - 8.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

- 9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan di Dukung 4 (empat) Kegiatan, yaitu :**
 - 9.1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi;
 - 9.2 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian
 - 9.3 Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
 - 9.4 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
 - 9.5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 10. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan di Dukung 3 (tiga) Kegiatan, yaitu :**
 - 10.1 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen;
 - 10.2 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
 - 10.3 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah
- 11. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan di Dukung 3 (tiga) Kegiatan, yaitu :**
 - 11.1 Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri;
 - 11.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan perdagangan.
- 12. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan di Dukung 4 (empat) Kegiatan, yaitu :**
 - 12.1 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
 - 12.2 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk; (DAK)
 - 12.3 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk; (APBD)
 - 12.4 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk;
- 13. Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi dengan didukung 2 (dua) kegiatan, yaitu :**
 - 13.1 Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi
 - 13.2 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas

14. Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan didukung 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- 14.1 Pembinaan industri kecil menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri;
- 14.2 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah

15. Program peningkatan kemampuan teknologi industri dengan didukung 1 (satu) kegiatan, yaitu :

- 15.1 Pembinaan kemampuan teknologi industri

16. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial dengan didukung 1 (satu) kegiatan, yaitu :

- 16.1 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

BAB IV PENUTUP

1. Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigm baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.
2. Dalam pengembangan usaha dibidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah diperlukan iklim usaha yang kondusif didaerah guna pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kapuas, dengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah.
3. Peningkatan sarana dan prasarana di daerah harus dilaksanakan secepatnya dalam membuka keterisolasian daerah pedalaman guna mendukung dan mempercepat realisasi investasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi regional.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mengembangkan kewirausahaan dan profesionalisme para pengelola koperasi dan sektor usaha lainnya.
5. Perluasan dan Pengembangan akses informasi, teknologi, modal dan pasar sehingga berpengaruh terhadap peningkatan volume usaha, produktifitas dan daya saing para pengusaha skala mikro, kecil menengah dan koperasi.
6. Peningkatan lembaga penyedia jasa yang melayani pengusaha skala mikro kecil menengah dan koperasi (PMKMK).
7. Peningkatan koordinasi antar lembaga / badan yang mengembangkan program pembinaan pengusaha menengah kecil dan koperasi (PMKK).
8. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perdagangan,

Perindustrian, Koperasi dan UKM. Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang.

Kuala Kapuas, Januari 2017

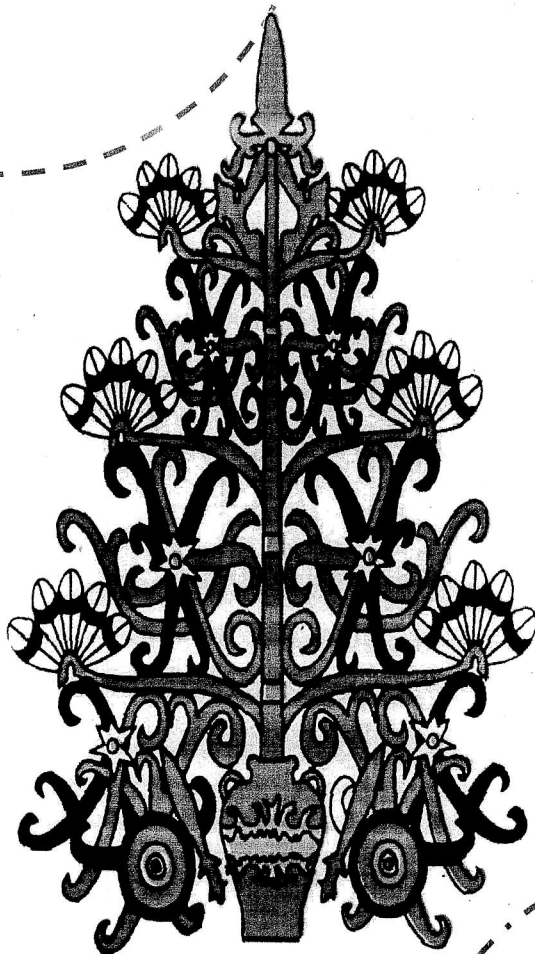
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kapuas,



H. SUPARMAN, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641113 198702 1 002



RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KAPUAS**

Jl. Tambun Bungai No. 7 Kuala Kapuas Telp. 0513-22013 Fax 0513-24300

Email : disperindagkapuas@yahoo.co.id Blog : www.disperindag-kopumkmpks.blogspot.com

JANUARI 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan limpahan rahmat-Nya, penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Program Rancangan Rencana Kerja Tahun 2018 ini digunakan sebagai bahan penyusunan keuangan RAPBD Kabupaten Kapuas Tahun 2018. Apabila terdapat kekurangan yang bersifat teknis maupun kualitatif dalam Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2018, kami mengharapkan masukan dari pihak yang berkepentingan sebagai review dan menjadi bahan perbaikan yang konstruktif.

Semoga Rancangan Rencana Kerja Tahun 2018 ini dapat menjadi komitmen dalam menciptakan kinerja yang progresif, transparan dan akuntabel.

Kuala Kapuas, Januari 2017.

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kapuas,



H. SUPARMAN, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641113 1987021 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB. I PENDAHULUAN.....	I
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2016.....	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..	30
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	36
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	45
BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	47
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	47
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	55
3.3. Program dan Kegiatan	59
BAB. IV PENUTUP.....	63
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD S/D Tahun 2016.....	13
Tabel 2	Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2016.....	19
Tabel 3	Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2016.....	20
Tabel 4	Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	21
Tabel 5	Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja tahun 2016	22
Tabel 6	Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran Tahun 2016.....	25
Tabel 7	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kab. Kapuas.....	29
Tabel 8	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017.....	37
Table 9	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018.....	45
Tabel 10	Tujuan, Sasaran Jangka menengah Pelayanan SKPD	57

DAFTAR GAMBAR

1. Proses Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas 3
2. Keterkaitan Renstra dengan Dokumen lainnya menurut Alur
Perencanaan Pembangunan Daerah UU 25/2004 4

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap dan komprehensif tentang potensi daerah, penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian akan menghasilkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah dan berorientasi pada hasil Rencana Kerja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Tahun 2018 yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*treathment*) yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen RKPD dan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra).

Fungsi Rencana Kerja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas adalah sebagai tolak ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan dan

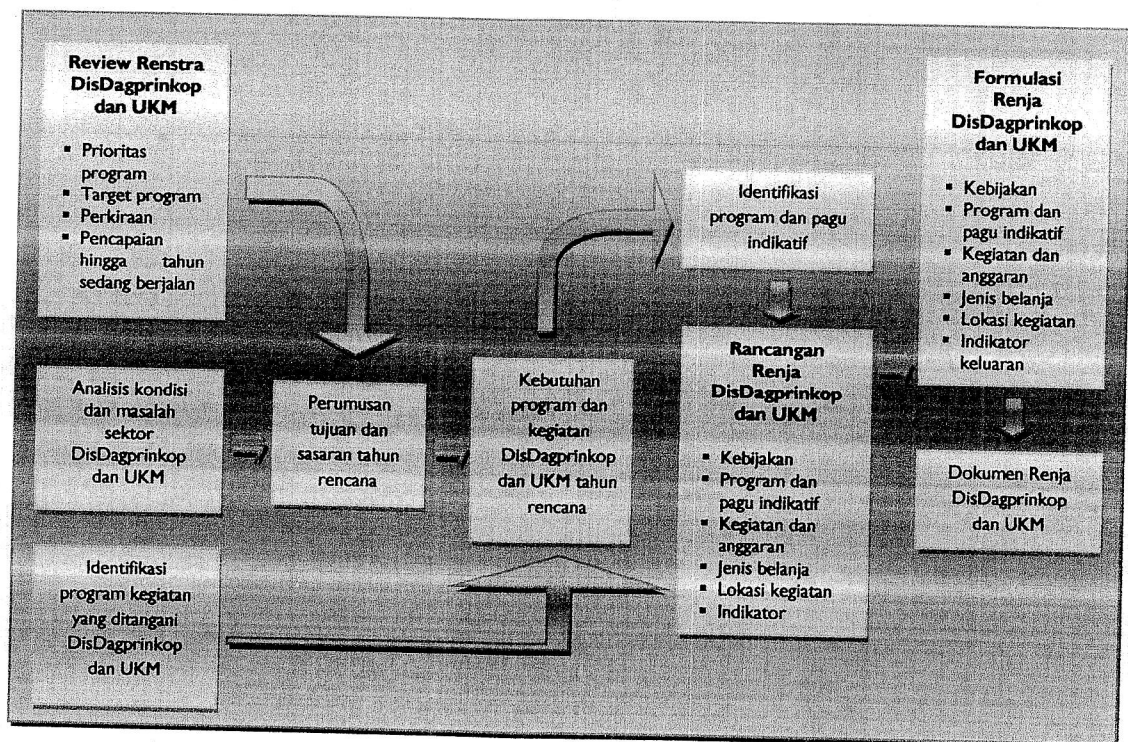
program Pemerintah Kabupaten Kapuas, agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global. Rencana kerja yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan yang dalam penyusunannya mengacu pada visi dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang baik tercermin dalam sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut:

1. Review Renstra SKPD yang merupakan review atas :
 - Prioritas program;
 - Target program;
 - Perkiraan pencapaian hingga tahun sedang berjalan.
2. Analisis kondisi dan masalah sektor Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas;
3. Perumusan tujuan dan sasaran tahun rencana;
4. Identifikasi program kegiatan yang ditangani Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas
5. Kebutuhan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM tahun rencana;
6. Identifikasi prioritas program dan pagu indikatif Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM;
7. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM yang memuat :
 - Kebijakan;
 - Program dan pagu indikatif;
 - Kegiatan dan anggaran;
 - Jenis belanja;
 - Lokasi kegiatan;
 - Indikator keluaran;
 - Unit pelaksana;
8. Formulasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas yang memuat :

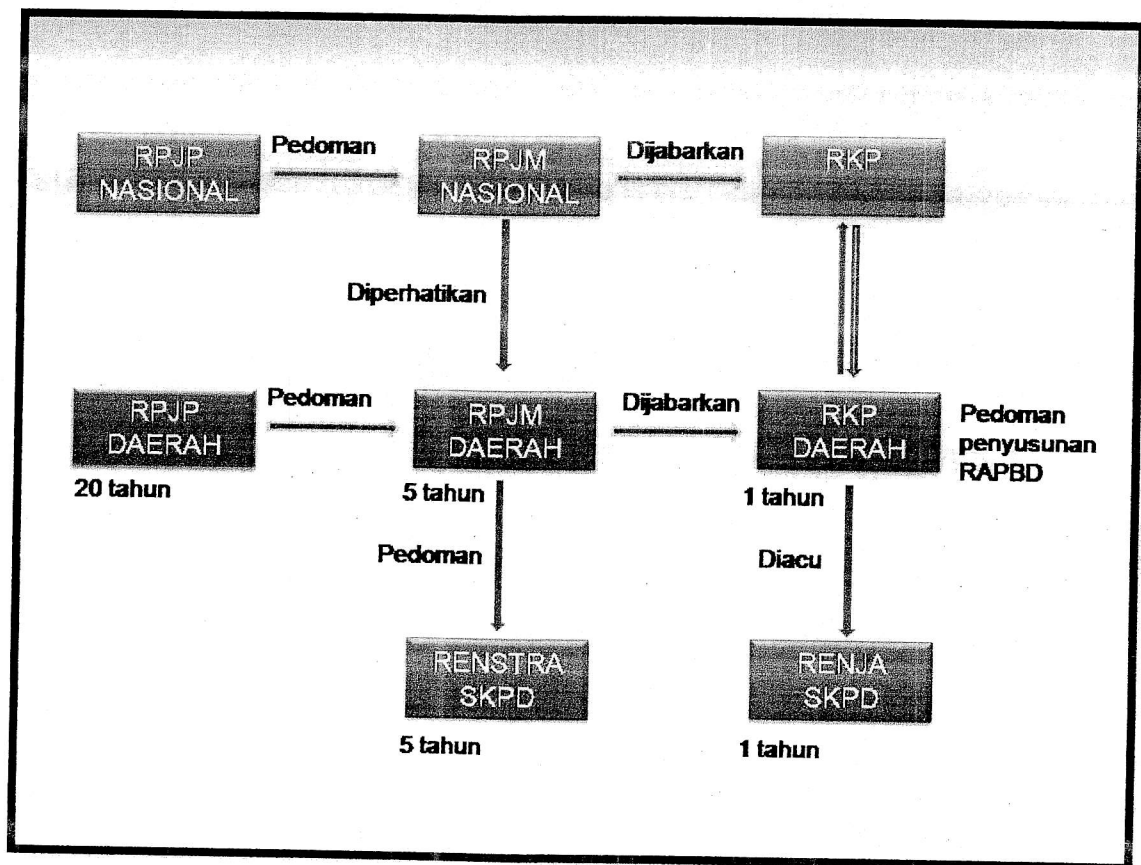
- Kebijakan;
 - Program dan pagu indikatif;
 - Kegiatan dan anggaran;
 - Jenis belanja;
 - Lokasi kegiatan;
 - Indikator keluaran;
 - Unit pelaksana.
9. Dokumen Rencana Kerja.

Gambar 1
Proses Penyusunan Dokumen Rencana Kerja
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas



Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian Renja memiliki keterkaitan dengan dokumen lainnya baik itu dokumen perencanaan tingkat nasional maupun daerah. Gambaran mengenai keterkaitan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan dalam bagan berikut :

Gambar 2
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Lainnya menurut Alur
Perencanaan Pembangunan Daerah UU 25/2004



1.2. Landasan Hukum

Beberapa muatan perundang-undangan yang menjadi Landasan Hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kapuas
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018
11. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 121 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2014
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) untuk barang ekspor Indonesia.
13. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 08/Per/M/IX/2005 Tahun 2005 tentang petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan

14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Republik Nomor : 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
15. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas dan kondisi yang diinginkan setiap tahunnya dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang tertuang dalam Renstra Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rancangan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, antara lain:

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Tahun 2018 adalah merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan

pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018.

Secara spesifik tujuan disusun Rancangan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, antara lain:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas.
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.
4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas pada rentang 1 (satu) tahun.

2.1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Fungsi Renja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas dan keterkaitan Renja Dinas Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Renja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Renja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas tahun lalu (tahun 2016) dan perkiraan tahun berjalan (tahun 2017), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas

Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas

Berisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas. Adapun tujuan Penyusunan Renja ini adalah untuk menyampaikan Rencana kegiatan Tahun 2018 Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas sesuai dengan tupoksi, sehingga dapat mencapai sasaran Renstra.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai rancangan awal RKPD

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas selaku SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Dari evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan kegiatan tahun lalu terdapat beberapa permasalahan yang dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Masih terdapat kinerja sasaran yang belum optimal walaupun rencana kerja telah dilaksanakan terutama dalam pelaksanaan kebijakan Bupati selaku kepala daerah;
2. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang harus ditingkatkan;
3. Masih kurang optimalnya pelayanan dasar kepada masyarakat, dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai dasar pelayanan serta sistem yang digunakan masih belum optimal;
4. Kurangnya Pemahaman Masyarakat mengenai penerapan dan prosedur pelaksanaan peraturan hukum (Peraturan Daerah) yang berlaku.

Adapun upaya penanganan yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan sebagaimana dimaksud diatas diantaranya :

1. Meningkatkan kinerja personil, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan tupoksi yang ada maupun tugas lainnya dengan lebih optimal;
2. Mengadakan pelatihan bagi aparatur, guna mendukung peningkatan kinerja aparatur itu sendiri;
3. Mengadakan kegiatan sosialisasi kepada aparatur dan masyarakat mengenai peraturan dan prosedur berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendukung peningkatan kinerja aparatur yang lebih optimal;

Adapun evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan capaian Renstra SKPD Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas sampai dengan tahun berjalan (tahun 2017) adalah sebagai berikut :

Rancangan Rencana Kerja	Tahun 2018
-------------------------	------------

Tabel 1
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2016
KABUPATEN KAPUAS**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kab. Kapuas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013-2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2017	
					Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah									
	I. BELANJA TIDAK LANGSUNG									
	II. BELANJA LANGSUNG :									
1 15 1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan perkantoran	95 %	90 %	90 %	90 %	100 %	90 %	90	100 %
1 15 1	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	500	100	100	100	100 %	100	100	100 %
1 15 1	2 Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik (bln)	12	12	12	12	100 %	12	12	100 %
1 15 1	3 Jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah aparatur yang memperoleh jasa jaminan pemeliharaan kesehatan (Org)	30	6	-	-	-	-	-	-
1 15 1	4 Penyediaan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jenis kendaraan dinas yang disediakan pemeliharannya (R4=1 unit, R2=8 unit)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1 15 1	5 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan (bln)	12	12	12	12	100 %	12	12	100 %
1 15 1	6 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (bln)	12	12	12	12	100 %	12	12	100 %

Rancangan Rencana Kerja

Tahun 2018

1		2		3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	15	1	9	7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan diperbaiki (unit)	10	-	-	-	10	10	100 %
1	15	1	10	8	Penyediaan alat tulis kantor (ATK)	Jumlah dan Jenis ATK yang disediakan (Paket)	1	1	1	100 %	1	1	100 %
1	15	1	11	9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis cetak penggandaan (paket)	1	1	1	100 %	1	1	100 %
1	15	1	12	10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik yang disediakan (paket)	1	1	1	100 %	1	1	100 %
1	15	1	13	11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor (paket)	1	1	1	100 %	1	1	100 %
1.	15	1	15	12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dan jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (ekspl)	48	24	24	100 %	24	24	100 %
1	15	1	17	13	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pegawai yang disediakan makanan dan minuman (org)	70	60	60	100 %	60	60	100 %
1	15	1	18	14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi keluar daerah (ta)	1	1	1	100 %	1	1	100 %
1	15	1	19	15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (ta)	1	1	1	100 %	1	1	100 %
1	15	1	20	16	Penyediaan jasa non PNS/honorir kantor	Jumlah tenaga teknis yang mendukung dinas (orang)	6	6	6	100 %	7	7	100 %
1	15	2		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	15	2	5	1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas (unit)	6	-	-	-	-	-	100 %
1	15	2	7	2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor (paket)	1	1	1	100 %	1	1	100 %
1	15	2	9	3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (paket)	1	1	1	100 %	1	1	100 %
1	15	2	22	4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor (paket)	1	1	1	100 %	1	1	100 %

Rancangan Rencana Kerja

Tahun 2018

1				2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	15	2	24	4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional		Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang disediakan pemeliharannya (R4=1 unit, R2=8 unit)		100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	100 %
1	15	2	28	5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran		80 %	80 %	80 %	80 %	100 %	80 %	80 %	100 %
1	15	2	29	6	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair		Pemeliharaan meubelair		80 %	80 %	80 %	20 %	25 %	80 %	80 %	100 %
1	15	2	42	7	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Rehabilitasi gedung kantor		80 %	80 %	80 %	80 %	100 %	80 %	80 %	100 %
1	15	4		Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS		Jumlah PNS yang pindah/purna tugas		4	4	4	2	2	100 %	3	3	
1	15	4	1	1	Pemulangan pegawai yang pensiun		Jumlah PNS yang pindah/purna tugas (orang)		4	4	2	2	100 %	3	3	100 %
1	15	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	100 %	80 %	80 %	100 %
1	15	5	3	1	Bimbingan implementasi peraturan perundang-undangan teknis		Jumlah peserta bintek (orang)		15	8	10	19	190 %	18	18	100 %
1	15	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	15	6	1	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja		85 %	80 %	81 %	81 %	81 %	82 %	82 %	82 %
1	15	6	2	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		Jumlah laporan keuangan semesteran		85 %	80 %	81 %	81 %	81 %	82 %	82 %	82 %
1	15	6	3	3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran		Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran		85 %	80 %	81 %	81 %	81 %	82 %	82 %	82 %
1	15	6	4	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Jumlah laporan keuangan akhir tahun		85 %	80 %	81 %	81 %	81 %	82 %	82 %	82 %
1	15	15		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah		Persentase UMKM yang aktif		95 %	80 %	80 %	85 %	85 %	85 %	87 %	87 %	87 %

Rancangan Rencana Kerja

Tahun 2018

1			2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	15	15	2	1	Sosialisasi tentang usaha kecil menengah	Jumlah peserta sosialisasi yang memahami kebijakan tentang UKM	30	30	-	-	100 %	-	-	100 %
1	15	15	6	2	Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah	Jumlah rapat koordinasi (kali)	8	8	-	-	100 %	-	-	100 %
1	15	16			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha kecil menengah	Cakupan UMKM binaan (%)	95	80	85	85	100 %	87	87	87 %
1	15	16	3	1	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Terlaksananya kegiatan temu usaha UMKM dengan usaha besar dan atau investor (kali)	1	1	1	1	100 %	1	1	100 %
1	15	16	5	2	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Terlaksananya partisipasi pada pameran Smesco (kali)	1	1	1	1	100 %	1	1	100 %
1	15	17			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah dana yang disalurkan pemerintah bagi UMKM (Rp. Milyar)	80,377	55	59	59	100 %	66	66	100 %
1	15	17	1	1	Sosialisasi informasi penyediaan permodalan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pelaksanaan penyaluran KUR dengan instansi terkait (kali)	1	1	-	-	-	-	-	-
1	15	17	4	2	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dan Koperasi	Jumlah rapat koordinasi fasilitasi pemerintah untuk UMKM (ta)	8	8	-	-	-	-	-	-
1	15	18			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	100 %	76 %	80 %	80 %	100 %	85 %	85 %	100 %
1	15	18	1	1	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi (ta)	1	1	1	1	100 %	1	1	100 %
1	15	18	4	2	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Terlaksananya sosialisasi pemahaman perkoperasian (kali)	1	1	-	-	100 %	-	-	-
1	15	18	5	3	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Terbinanya RAT Koperasi (bin)	12	12	12	12	100 %	12	12	100 %

Rancangan Rencana Kerja

Tahun 2018

1		2		3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	15	18	6	4	Peningkatan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	1	1	1	1	100 %	1	1	100 %
2	06	15			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	85 %	75 %	75 %	75 %	100 %	75 %	75 %	100 %
2	06	15	1	1	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	1	1	1	1	100 %	1	1	100 %
2	06	15	2	2	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-pengaduan konsumen	1	1	1	1	100 %	1	1	100 %
2	06	15	4	3	Operasional dan pengembangan UPT kemetretrologian daerah	1	1	1	1	100 %	1	1	100
2	06	17			Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	50.000	35.000	37.000.000,00	13.380.778,92	36,16	38.000	38.000	100 %
2	06	17	2	1	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	1	1	1	1	100 %	1	1	100 %
2	06	17	1	2	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perdagangan	1	1	1	1	100 %	1	1	1
2	06	18			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	83 %	70 %	70 %	70 %	100 %	70 %	70 %	100 %
2	06	18	1	1	Penyempurnaan perangkat peraturan kebijakan dan pelaksanaan operasional	2	2	2	2	100 %	2	2	100 %
2	06	18	2	2	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	0	1	-	-	-	-	-	-

Rancangan Rencana Kerja

Tahun 2018

1		2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	06	18	3	3	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah kegiatan pasar murah menjelang Idul Fitri dan Natal	2	2	2	100 %	2	100 %
				4	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk - Pembangunan Pasar							
2	06	18	6	4	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan monitoring harga sembako secara berkala (bln)	Selama dana DAK ada 12	Selama dana DAK ada 12	Selama dana DAK ada 12	Selama dana DAK ada 12	Selama dana DAK ada 12	100 %
2	07	15			Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Persentase Industri Berbasis Teknologi	25	10	10	100 %	13	100 %
2	07	15	6	1	Penguatan kemampuan industry berbasis teknologi	Jumlah Pengrajin yg terlatih (orang)	20	20	20	100 %	20	100 %
2	07	15			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase Industri yang menerapkan SNI	12 %	6 %	6 %	100 %	6 %	100 %
2	07	15	1	1	Pembinaan kemampuan teknologi industri		1	1	1	100 %	1	100 %

Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Tahun 2016 mengelola anggaran sebesar Rp. 3.807.624.000,- (pagu anggaran belanja tidak langsung), realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 3.717.482.550,- atau 97,63 % dari pagu anggaran. Sedangkan pagu anggaran belanja langsung Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kapuas Tahun 2016 berjumlah sebesar Rp.4.771.577.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2016, realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 4.675.657.542,- atau 97,99 persen. Jika dibandingkan dengan pagu anggaran belanja langsung Tahun 2015 sebesar Rp. 10.390.942.000,- maka pada Tahun 2016 terjadi penurunan pagu anggaran sebesar Rp. 5.715.284.458,- atau sekitar 55,00 persen.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas pada Tahun 2016 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Kapuas. Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2016 sebagaimana pada tabel I dibawah ini :

Tabel 2 . Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2016

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Belanja			
I	Belanja Tidak Langsung	3.807.624.000,-	3.717.482.550,-	97,63
II	Belanja Langsung			
	- Belanja Barang dan Jasa	2.845.850.000,-	2.770.343.709,-	97,35
	- Belanja Modal	1.727.253.000,-	1.718.110.000,-	99,47

Alokasi anggaran program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan rutin Dinas yang membiayai 5 program dan 24 kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.703.536.610,-.
2. Program dan kegiatan urusan Perindustrian yang membiayai 4 program dan 6 kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp. 599.230.750,-
3. Program dan kegiatan urusan Perdagangan yang membiayai 3 program dan 9 kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.979.953.632,-
4. Program dan kegiatan urusan Koperasi UMKM yang membiayai 4 program dan 10 kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp. 392.581.550,-

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran per program Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 3. Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2016

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian Keuangan	% Capaian Fisik
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	921.496.000	893.551.060	96,97	100,00
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	661.344.000	630.319.800	95,31	100,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur	55.845.000	52.998.000	94,90	100,00
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	110.043.000	106.176.750	96,49	100,00
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20.500.000	20.491.000	99,96	100,00
6	Program pengembangan industri kecil dan menengah	89.600.000	89.549.500	99,74	100,00
7	Program pengembangan kapasitas iptek system produksi	55.250.000	54.822.750	99,23	100,00
8	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	83.750.000	83.535.500	99,74	100,00
9	Program pengembangan Sentra-sentra industri potensial	376.931.000	371.323.000	98,51	100,00
10	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	95.860.200	91.833.992	95,80	100,00
11	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	323.500.000	320.090.560	98,95	100,00
12	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	1.584.239.000	1.568.029.080	98,98	100,00
13	Program peningkatan penciptaan iklim usaha kecil menengah kondusif	24.500.000	24.486.000	99,94	100,00
14	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	66.290.000	66.190.000	99,85	100,00
15	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	71.499.000	71.065.750	99,39	100,00
16	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	230.929.800	230.839.800	99,96	100,00
JUMLAH		4.771.577.000	4.675.302.542	97,98	100,00

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil capaian Fisik Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas sebesar 100 % dan capaian

keuangan sebesar 97,98 %. Dengan capaian fisik dan keuangan tersebut Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya.

Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi program/kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada tahun 2016 ini terdapat 3 (tiga) program di Dinas perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas yang tidak memenuhi target kinerja (≤ 100 %) sebagaimana yang telah direncanakan yaitu : Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM (0 %) dan Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor (28,85 %). Penyebab tidak terpenuhinya target Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM disebabkan karena ada pemangkasan anggaran di Kementerian Koperasi dan UKM sehingga pihak Bank pada tahun 2016 ini tidak menyalurkan bantuan modal untuk koperasi maupun UKM. Sedangkan untuk nilai ekspor terjadi penurunan nilai ekspor karena permintaan pasar menurun dari negara-negara tujuan ekspor dan turunnya harga komoditas karet. Target program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah tidak tercapai karena terbatasnya dana untuk membina UMKM di 17 Kecamatan.

Tabel 4. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)
1.	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Jumlah dana yang disalurkan pemerintah bagi UMKM	Rp	70.362.614	-	-
1.	Pengembangan klaster bisnis	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	Kali	1	1	100
2.	Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk UMKM	Jumlah rapat koordinasi yg dilaksanakan	Kali	5	5	100

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah keg monitoring evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan	Kali	2	2	100
II	Peningkatan dan pengembangan ekspor	Ekspor bersih perdagangan	US\$	40.000.000,00	11.540.728,19	28,85
1.	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Jumlah keg. Pameran yang dilaksanakan	Kali	2	2	100
2.	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perdagangan	Jumlah keg. rakor yg dilaksanakan	Kali	5	5	100
III	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Cakupan UMKM binaan	Persen	91	17,64	18,57
1.	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah penyelenggaraan pelatihan	Kali	3	3	100

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari 16 program dan 49 kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas pada tahun 2016 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang direncanakan (100 %) hanya sebanyak 13 program dan 49 kegiatan sebagaimana pada tabel 3 dibawah ini.

Tabel 5. Realisasi Anggaran Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja Tahun Anggaran 2016

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	100
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	bulan	12	12	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	100
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Ter	tahun	1	1	100
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran administrasi keuangan	tahun	1	1	100
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	bulan	12	12	100
6	Penyediaan ATK	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	12	12	100
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	tahun	1	1	100

Rancangan Rencana Kerja	Tahun 2018
-------------------------	------------

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan bangunan kantor	tahun	1	1	100
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Tersedianya surat kabar harian/warta perundang-undangan	bulan	12	12	100
10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya konsumsi harian pegawai dan pelaksanaan rapat/pertemuan	bulan	12	12	100
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya komunikasi dan koordinasi dengan stake holder diluar daerah	tahun	1	1	100
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya komunikasi dan koordinasi dengan stake holder dalam daerah	tahun	1	1	100
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	100
1.	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	Paket	1	1	100
2.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Paket	1	1	100
3.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Paket	1	1	100
4.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya perbaikan gedung kantor	bulan	12	12	100
5.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan elektronik	paket	1	0	-
6.	Pemeliharaan rutin/berkala meubeler	Terlaksananya pemeliharaan meubeler	paket	1	1	100
III	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pelanggaran PNS	persen	1	0	-
I	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian	paket	1	1	100
IV	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	95	80	84,21
I	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparatur	Orang	15	15	100
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	persen	100	100	100
1.	Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	8	8	100
2.	Dokumen laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Dokumen	2	2	100
3	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	Dokumen	1	1	100
4	Penyusunan laporan akhir tahun	Tersusunnya laporan akhir tahun	Dokumen	1	1	100
VI	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif	persen	95	78,96	83,11
1.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Terlaksananya komunikasi dan koordinasi dengan stake holder diluar daerah	Ta	1	1	100

Rancangan Rencana Kerja	Tahun 2018
-------------------------	------------

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)
2.	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Jumlah Peserta Pelatihan Akuntansi Koperasi	Kegiatan	2	2	100
3.	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah Koperasi yang dibina dan dinilai	Ta	1	1	100
4.	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Pembubaran koperasi	Ta	1	1	100
5.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	Ta	1	1	100
VIII	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase komoditas perdagangan diawasi peredarannya dipasar	persen	80	75	93,75
1.	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Terlaksananya komunikasi dan koordinasi dengan stake holder diluar daerah	Ta	1	1	100
2.	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Terlaksananya pengawasan terhadap barang beredar dan jasa di masyarakat	Ta	1	1	100
3.	Operasionalisasi dan Pengamanan UPT Kemetrolagian	Terlaksananya kegiatan tera dan tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya	Kali	1	1	100
X	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase laju pertumbuhan nilai perdagangan dalam negeri	persen	80	60	75,00
1.	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah pasar penyeimbang harga yang dilaksanakan	Paket	1	1	100
2	Peningkatan sistim dan jaringan informasi perdagangan	Tersedianya data harga sembako	Ta	1	1	100
3	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (DAK)	Jumlah pasar tradisional yang dibangun	Paket	1	1	100
4	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (APBD)	Terlaksananya rehab pasar mantangai	Paket	1	1	100
IX	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Persentase industri berbasis teknologi	persen	20	15	75,00
1.	Koordinasi model ventura bagi industri berbasis teknologi	Terlaksananya komunikasi dan koordinasi dengan stake holder diluar dan dalam daerah	Kali	4	4	100
2.	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Terlaksananya lomba menganyam tikar rotan	Ta	1	1	100
X	Pengembangan industri kecil menengah	Persentase produktivitas industri kecil menengah	persen	80	75	93,75
1	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah pameran yang dilaksanakan	kegiatan	4	3	75,00
2	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah	Terlaksananya komunikasi dan koordinasi dengan stake holder diluar daerah	Ta	1	1	100

Rancangan Rencana Kerja	Tahun 2018
-------------------------	------------

- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (> 100%) untuk tahun 2016 ada 1 program.

Tabel 6. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaranTahun Anggaran 2016

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)
I	Peningkatan penciptaan idkim usaha kecil menengah yang kondusif	Persentase UMKM aktif	Persen	87	122,75	141,09
I.	Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah	Jumlah kegiatan pameran yang dilaksanakan	Ta	1	1	100

- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
- Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD.
- Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas.
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya

dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 159 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, menjabarkan Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas..

Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas. mempunyai **tugas pokok** membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di Bidang Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM, sesuai keijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Pembinaan dan pengorganisasian pengembangan industri kecil dan menengah, industri agro dan kimia, logam, mesin, tekstil dan aneka serta industri alat transportasi dan telematika
3. Penetapan bidang usaha perdagangan, industri, koperasi dan UKM prioritas Kabupaten
4. Pemberian perijinan bidang perdagangan dan industri yang menjadi kewenangan Kabupaten
5. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan perdagangan, industri, koperasi dan UKM di Kabupaten
6. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha perdagangan, industri, koperasi dan UKM
7. Pembinaan dan pengorganisasian pengembangan bidang perdagangan ekspor dan impor
8. Pembinaan dan pengawasan dalam pemberian ijin usaha perdagangan

9. Koordinasi, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan penyajian informasi wajib daftar perusahaan
10. Koordinasi, dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan
11. Koordinasi, pembinaan dan pengawasan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan persetujuan penyelenggaraan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi dan seminar dagang) skala nasional
12. Pembinaan dan pengkoordinasian perlindungan konsumen, kemetrollogian, pengawasan barang beredar dan penyelesaian sengketa konsumen serta pengendalian pelaksanaan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa
13. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi
14. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten
15. Bimbingan pengawasan fasilitasi bantuan modal usaha bidang perdagangan, industri, koperasi dan UKM serta penilaian pemeringkatan koperasi
16. Pembinaan dan pengembangan bidang usaha kecil menengah industri pertanian, perdagangan, hortikultura dan industri jasa perdagangan dan aneka usaha serta peningkatan kemitraan dan menumbuh kembangkan wirausaha baru. Kegiatan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pelaku usaha yang.

Kegiatan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pelaku usaha yang dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas dalam era otonomi daerah dan reformasi birokrasi pemerintahan adalah sebagai berikut :

2.2.1. Jenis Pelayanan

- a) Pemberian/penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) atau disebut dengan *certificate of Origin (COO)*. SKA adalah surat keterangan asal barang yang menyatakan barang tersebut diolah dan atau di ekspor dari Indonesia. Tujuannya yaitu sebagai alat pendataan ekspor Indonesia dan untuk mendapatkan preferensi atau pengurangan bea masuk di Negara tujuan.
- b) Pelaksanaan Tera/Tera Ulang alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP). Kegiatan tera/tera ulang UTTP adalah serangkaian proses

pemeriksaan/pengujian oleh pegawai yang berhak dengan menandai baik tanda sah, tanda batal maupun surat keterangan tertulis berdasarkan hasil pengujian yang meliputi antara lain : ukuran, takaran, timbangan, perlengkapannya dan pengujian. Kegiatan tera/tera ulang UTTP dilaksanakan oleh Kelembagaan UPTD Balai Pelayanan Kemetrolagian dengan memberikan penyuluhan, bimbingan, pelaksanaan tera, tera ulang dan Pos ukur ulang yang menjangkau semua wilayah Kabupaten Kota dalam Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun tujuan pelaksanaan tera/tera ulang UTTP yaitu untuk melindungi kepentingan umum (produsen dan konsumen) dalam transaksi penerimaan barang dan jasa.

2.2.2. Ruang Lingkup Pelayanan

Ruang lingkup dari jenis pelayanan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, yaitu :

- a) Pelayanan permintaan SKA dilaksanakan setiap hari kerja dan terkadang hari liburpun dilakukan bila ada permintaan dengan waktu penerbitan SKA selambat-lambatnya 1(satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan dari eksportir (apabila data/informasi SKA benar).
- b) Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) dilaksanakan oleh UPTD Balai pelayanan kemetrolagian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah 1 (satu) tahun sekali.

Tabel 7 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI UMKM KABUPATEN KAPUAS

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek	-	-	8	8	15	18	20	15	0	0	0	
2	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	-	-	8	8	8	8	9	8	0	0	0	
3	Jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/besar dan IKM	-	-	5	10	15	20	5	17	0	0	0	
4	Jumlah usaha kecil dan menengah	-	-	2078	2118	2159	2204	2600	3855	0	0	0	
5	Jumlah koperasi aktif	-	-	398	408	423	443	317	334	0	0	0	
6	Jumlah Koperasi yang mempunyai peringkat A/sehat	-	-	5	5	6	8	12	8	0	0	0	
7	Jumlah koperasi dan UKM yang menerima bantuan modal	-	-	30	35	40	50	4	-	0	0	0	
8	Jumlah dana yang disalurkan BPR/LKM/BUJIN kepada koperasi dan UKM	-	-	58.745.111	65.992.111	70.326.111	75.289.111	250.000.000	-	0	0	0	
9	Jumlah Industri menggunakan bahan baku produk lokal (IKM)	-	-	248	252	260	267	138	387	0	0	0	
10	Jumlah Industri UKM meningkat (IKM)	-	-	330	335	340	345	395	387	0	0	0	
11	Jumlah ijin industri meningkat (TDI)	-	-	50	65	75	125	31	35	0	0	0	
12	Nilai ekspor meningkat (USD)	-	-	36.000.000.000	37.000.000.000	40.000.000.000	45.000.000.000	13.380.778,92	11.540.728,19	0	0	0	
13	Volume ekspor meningkat (Ton)	-	-	11.000	12.000	15.000	20.000	9.332,14	8.776,90	0	0	0	
14	Jumlah ijin usaha meningkat (SIUP)	-	-	150	155	160	165	234	235	0	0	0	
15	Jumlah pedagang kecil, menengah, dan besar meningkat	-	-	150	155	160	165	234	235	0	0	0	
16	Jumlah pengawasan barang beredar	-	-	4	4	4	4	4	3	0	0	0	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Kondisi lingkungan kerja yang diharapkan tentunya dapat memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program kerja Dinas/Instansi serta *stakeholder* guna terwujudnya Visi Pembangunan Daerah.

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKP

KONDISI SAAT INI

1. Kerjasama dan saling keterkaitan dalam pembinaan dan pengembangan industrialisasi, perdagangan dengan para BUMN belum terprogram dan berjalan secara optimal,
2. Sarana dan Fasilitas penunjang operasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pedagang, industri, koperasi dan UKM belum memadai,
3. Tugas fungsional yang ada baik dibidang perdagangan, industri, koperasi dan UKM belum memenuhi formasi kebutuhan yang diharapkan,
4. Sistim dan prosedur kerja yang berkaitan dengan penataan, dan pengelolaan Asset, Kekayaan daerah belum berjalan secara optimal,
5. Tingkat produktivitas dan kesadaran PNS dalam mengemban tugas, berkreasi dan berinovasi rata-rata belum maksimal,
6. Sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rutinitas perkantoran dan pembinaan terhadap usaha perdagangan, industri, koperasi dan UKM diperoleh dari APBD yang relatif terbatas,

KONDISI YANG DIHARAPKAN

1. Optimalisasi pengembangan kerjasama dengan para BUMN dan instansi terkait dalam pembinaan pedagang, industri, koperasi dan UKM dapat dilaksanakan berjalan dengan baik,
2. Berupaya meningkatkan sarana dan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan pembinaan serta fasilitasi kepada dunia usaha (pedagang, industri, koperasi dan UKM),
3. Berupaya mendapatkan tambahan formasi tenaga fungsional (penyuluh perdagangan, industry, koperasi) serta memberdayakan tenaga fungsional yang ada secara maksimal,

4. Memberdayakan serta membangkitkan semangat kerja PNS dalam mengemban tugas pekerjaan, kreatif, inovatif, disiplin dan profesional,
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber pembiayaan yang tersedia (APBD/APBN) untuk melaksanakan program pembangunan disektor industri perdagangan, industri dan koperasi.

Kondisi lingkungan kerja yang diharapkan tentunya dapat memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program kerja Dinas/Instansi serta stakeholder guna terwujudnya Visi Pembangunan Daerah

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, adalah kurangnya sarana prasarana, profesionalitas aparat pelaksana dan masih rendahnya SDM dan sarana prasarana penunjang bagi pelaku usaha. Selain masalah yang telah dikemukakan pada analisis kinerja di atas berikut ini akan digambarkan permasalahan dan hambatan secara umum yang mempengaruhi kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Permasalahan administratif
 1. Keberhasilan kinerja bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, instrumennya berada pada sektor lain yang masih merupakan hambatan seperti : iklim usaha, kualitas dan kuantitas infrastruktur ke lokasi sumber produksi/sentra produksi IKM, tingkat bunga kredit, biaya distribusi/logistik, kontinuitas bahan baku dan perkembangan harganya/stabilitas, sarana penunjang/pelabuhan laut dan udara, dll.
 2. Kurangnya SDM Aparat yang berkualitas.
 3. Masih kurangnya beberapa sarana dan prasarana.
 4. Belum adanya tenaga ahli penera sehingga Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas harus meminta bantuan propinsi untuk kegiatan tera/tera ulang yang mengakibatkan belum optimalnya PAD untuk tera/tera ulang

- b. Permasalahan teknis
 - a) Permintaan masyarakat terhadap komoditi kebutuhan bahan pokok, barang penting dan barang strategis lainnya pada saat tertentu seperti hari-hari besar nasional cenderung melonjak yang tidak diimbangi oleh persediaan stok barang yang cukup sehingga menyebabkan kenaikan harga.
 - b) Masih rendahnya daya saing komoditi ekspor daerah.
 - c) Perlindungan Konsumen dan Pengawasan barang beredar belum optimal.
 - d) Kualitas SDM pengelola koperasi relatif masih rendah
 - e) Kemampuan untuk mengakses modal utamanya pada perbankan masih lemah
 - f) Partisipasi Anggota Pada Koperasi Relatif masih rendah
Partisipasi anggota pada koperasi masih rendah, utamanya pada kesadaran anggota untuk menabung pada koperasi.

2.3.3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Milenium Development Goals)

Pencapaian visi dan misi Dinas Perindustrian Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi UKM sebagai penjabaran dari visi misi Bupati Kapuas tahun 2013-2018 akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian visi Kabupaten Kapuas yaitu **“TERWUJUDNYA KABUPATEN KAPUAS YANG LEBIH MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI MELALUI PEMBANGUNAN YANG ADIL DAN MERATA SERTA BERKELANJUTAN”**

Target penanggulangan kemiskinan secara nasional, sesuai arahan Propenas (2015–2019), adalah mengurangi jumlah penduduk miskin dari 11,1 persen pada 2015 menjadi 7-8 persen pada 2019. Target itu dicapai melalui dua strategi. Pertama, meningkatkan pendapatan melalui perluasan peluang usaha, kesempatan kerja, dan peningkatan produktivitas penduduk miskin. Kedua, mengurangi pengeluaran keluarga miskin untuk pangan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Adapun kebijakan utamanya adalah perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan perlindungan sosial.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani MDGs, juga berkomitmen mewujudkan delapan tujuan tersebut sebagai perwujudan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kualitas hidup lebih baik. Secara nasional, komitmen tersebut dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan nasional, antara lain dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014. Lalu, dipertegas pada RPJMN 2015-2019.

Dari delapan tujuan MDGs yang akan dicapai, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM memiliki kewenangan menangani poin 1. Untuk MDGs pertama, menanggulangi kemiskinan dan kelaparan.

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Adapun tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

- 1) Masih kurangnya aparat pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas yang memiliki SDM berkualitas.
- 2) Kerjasama antar bidang masih lemah didalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas
- 3) Keterbatasan tenaga fungsional dibidang perdagangan, industri, koperasi dan UKM dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan, penyuluhan kepada masyarakat maupun kepada pelaku perdagangan, industri, koperasi dan UKM
- 4) Sikap kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam berusaha relatif lemah,

Peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

- 1) Kebijakan Pemerintah Pusat dibidang perdagangan, industri, koperasi dan UKM yang bersifat normative maupun dukungan finansial dalam pelaksanaan program pembangunan perdagangan, industri, koperasi dan UKM di daerah,
- 2) Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi, iklim usaha dan kemudahan bagi para investor serta kepedulian yang tinggi terhadap keberadaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM),
- 3) Potensi sumber daya alam yang memadai,
- 4) Adanya kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain dalam bidang ekonomi perdagangan dan investasi baik secara bilateral maupun multilateral dapat mempertahankan pangsa pasar produk menembus pasar global,
- 5) Kesadaran yang tinggi dari masyarakat Kapuas untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor dari luar.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan.

Kebijakan pemerintah yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Oleh karena itu untuk melaksanakan pembangunan dibidang Perdagangan, industri, Koperasi dan UKM di Kabupaten Kapuas maka perlu didukung oleh struktur organisasi kelembagaan dinas yang dinamis. Dalam hal ini pemberdayaan Perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (*pro poor*). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (*pro growth*). Keberadaan Koperasi dan UKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subjek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*).

Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UKM diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri. Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan UKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kokoh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperas dan UKM merupakan leader perekonomian Indonesia. Ia menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Disisi lain untuk mempercepat proses industrialisasi, menjawab tantangan dari dampak negatif gerakan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia, serta mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, pembangunan industri

Kabupaten Kapuas memerlukan arahan dan dukungan kebijakan serta bantuan pendanaan pemerintah pusat. Dalam melaksanakan proses pembangunan industri, keadaan tersebut merupakan kenyataan yang harus dihadapi serta harus menjadi pertimbangan yang menentukan dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan, sekaligus merupakan paradigma baru yang harus dihadapi oleh negara manapun dalam melaksanakan proses industrialisasi negaranya. Kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan daerah akan bangun industri yang kuat dalam jangka menengah, maupun jangka panjang mampu memberikan *multiplier effect* tidak hanya pada penyerapan tenaga kerja maupun *value added* pada hasil pengolahan hulu komoditi unggulan akan tetapi juga akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan perekonomian nasional.

Dari sisi perdagangan, tahun 2015 tepatnya 31 Desember merupakan awal berlangsungnya Asean Economic Community (AEC) atau dalam bahasa Indonesia yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal ini secara sederhana dapat dikatakan sebagai kesepakatan negara-negara ASEAN dalam meningkatkan kerja sama bidang perekonomian yang bertujuan untuk menciptakan aliran bebas barang, jasa, dan tenaga kerja terlatih, serta aliran investasi yang lebih bebas. Lebih detail lagi dapat dikatakan bahwa tujuannya untuk menciptakan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, dimana terjadi *free flow* atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN. Melihat kondisi ini, Asean Economic Community (AEC) merupakan momen yang penting bagi Indonesia dan secara khusus bagi masyarakat Kabupaten Kapuas karena akan memberikan peluang kepada kita untuk memperluas pasar bagi produk-produk unggulan kita. Namun di lain pihak, pemberlakuan AEC juga akan menjadi tantangan mengingat penduduk Indonesia yang sangat besar tentunya akan menjadi tujuan pasar bagi produk-produk Negara ASEAN lainnya.

Rekomendasi yang dapat formulasikan berujuk pada isu tersebut antara lain :

- 1) Pengembangan UKM/IKM melalui Pemberdayaan Usaha Mikro dan Pengembangan kapasitas UKM serta Revitalisasi Industri Kecil Menengah.

- 2) Perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Industri yang berbasis komoditi unggulan wilayah untuk mendukung agribisnis.
- 3) Perkuatan kelembagaan koperasi dan peningkatan keaktifan koperasi dalam rangka pencapaian peningkatan jumlah koperasi yang berdaya saing.
- 4) Menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan usaha serta menjamin pelaku usaha dari praktek persaingan usaha yang tidak sehat.
- 5) Peningkatan daya saing produk unggulan daerah melalui pembinaan dan bantuan sarana produksi bagi pelaku usaha UKM/IKM.
- 6) Stabilitasasi harga bahan pokok dan barang strategis, pengembangan pasar tradisional dalam mendukung distribusi dan ketersediaannya.
- 7) Pengembangan dan perluasan pasar ekspor bagi komoditas unggulan dalam usaha meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 8) Peningkatan pemanfaatan dan pengolahan bahan baku komoditi unggulan dengan menggunakan teknologi tepat guna.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rancangan Rencana Kerja memuat informasi tentang Rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas; dan Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah berikut pendanaan indikatif.

Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan Rancangan Renja Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 8 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN KAPUAS

Rancangan Awal RKPD											
Hasil Analisis Kebutuhan											
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
/	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuala Kapuas	Cakupan layanan perkantoran	94 %	952.411	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuala Kapuas	Cakupan layanan perkantoran	94 %	952.411	
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Kuala Kapuas	Jumlah surat terkirim	100	264.326	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Kuala Kapuas	Jumlah surat terkirim	100	264.326	
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan PNS	Kuala Kapuas	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik (bln)	12	90.000	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan PNS	Kuala Kapuas	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik (bln)	12	90.000	
	3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Kuala Kapuas	Jumlah aparatur yang memperoleh jasa jaminan pemeliharaan kesehatan (Org)	-	-	3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Kuala Kapuas	Jumlah aparatur yang memperoleh jasa jaminan pemeliharaan kesehatan (Org)	6	-	
	4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kuala Kapuas	Jumlah jenis kendaraan dinas yang disediakan pemeliharannya (R4=1, R2=8 unit)	100 %	70.175	4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kuala Kapuas	Jumlah jenis kendaraan dinas yang disediakan pemeliharannya (R4=1, R2=8 unit)	100 %	70.175	
	5 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kuala Kapuas	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan (bln)	12	20.000	5 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kuala Kapuas	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan (bln)	12	20.000	
	6 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kuala Kapuas	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (bln)	12	29.717	6 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kuala Kapuas	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (bln)	12	29.717	
	7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kuala Kapuas	Jumlah peralatan yang diperbaiki	-	-	7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kuala Kapuas	Jumlah peralatan yang diperbaiki	20	-	
	8 Penyediaan alat tulis kantor (ATK)	Kuala Kapuas	Jumlah dan jenis ATK yang disediakan (Paket)	1	55.214	8 Penyediaan alat tulis kantor (ATK)	Kuala Kapuas	Jumlah dan jenis ATK yang disediakan (Paket)	1	55.214	

Tahun 2018

Rancangan Rencana Kerja

1	2		3	4		5	6	7		8	9		10	11	12
	9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kuala Kapuas	Jumlah dan jenis cetak penggandaan (paket)	1	22.000	9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kuala Kapuas	Jumlah dan jenis cetak penggandaan (paket)	1	22.000			
	10	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kuala Kapuas	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik yang disediakan (paket)	1	5.809	10	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kuala Kapuas	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik yang disediakan (paket)	1	5.809			
	11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kuala Kapuas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	1	-	11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kuala Kapuas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	1	-			
	12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kuala Kapuas	Jumlah dan jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eksp)	24	6.000	12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kuala Kapuas	Jumlah dan jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eksp)	36	6.000			
	13	Penyediaan makanan dan minuman	Kuala Kapuas	Jumlah pegawai yang disediakan makanan dan minuman (org)	70	79.170	13	Penyediaan makanan dan minuman	Kuala Kapuas	Jumlah pegawai yang disediakan makanan dan minuman (org)	55	79.170			
	14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi/Konsultasi daerah (kali)	40	250.000	14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi/Konsultasi daerah	20	250.000			
	15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten Kapuas	Jumlah rapat koordinasi dan kunjungan kerja (kali)	30	60.000	15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten Kapuas	Jumlah rapat koordinasi dan kunjungan kerja (kali)	30	60.000			
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Kuala Kapuas	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	341.000	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Kuala Kapuas	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	341.000			
	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kuala Kapuas	Jumlah dan jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	40.000	2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kuala Kapuas	Jumlah dan jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor	1	40.000			
	2	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Kuala Kapuas	Pemeliharaan gedung kantor (paket)	1	85.000	3	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Kuala Kapuas	Pemeliharaan gedung kantor (paket)	1	85.000			
	3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kuala kapuas	Jumlah dan jenis peralatan yang disediakan pemeliharannya (paket)	1	25.000	6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kuala kapuas	Jumlah dan jenis peralatan yang disediakan pemeliharannya (paket)	1	25.000			
	4	Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair	Kuala Kapuas	Jumlah dan jenis meubelair yang disediakan pemeliharannya (paket)	1	1.000	7	Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair	Kuala Kapuas	Jumlah dan jenis meubelair yang disediakan pemeliharannya (paket)	1	1.000			

Rancangan Rencana Kerja

Tahun 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perdagangan	Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan (ta)	1	30.000	3	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perdagangan			
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kabupaten Kapuas	Persentase laju pertumbuhan perdagangan dalam negeri	80 %	2.641.300	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase laju pertumbuhan perdagangan dalam negeri	80 %	2.591.390	
	1	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Kab. kapuas	Jumlah peserta sosialisasi	30	30.000	1	Jumlah peserta sosialisasi	30	30.000	
	2	Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk (DAK)	Kabupaten Kapuas	Jumlah pasar yang dibangun	1	861.300	2	Jumlah pasar yang dibangun	1	861.300	
	3	Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk (APBD)	Kabupaten Kapuas	Jumlah pasar yang dibangun/revitalisasi	2	1.050.000	3	Jumlah pasar yang dibangun/revitalisasi	2	1.050.000	
	4	Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk	Kabupaten Kapuas	Jumlah kegiatan pasar penyeimbang harga yang dilaksanakan	2	700.000	4	Jumlah kegiatan pasar penyeimbang harga yang dilaksanakan		700.000	
XIII		Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Kabupaten Kapuas	Persentase industri berbasis teknologi	20 %	65.000	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase industri berbasis teknologi	20 %	65.000	
	1	Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi	Kab. Kapuas dan Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi (ta)	1	20.000	1	Jumlah pelaksanaan koordinasi (ta)	1	20.000	
	2	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Selat	Jumlah pelaksanaan lomba (keg)	1	45.000	2	Jumlah pelaksanaan lomba (keg)	1	45.000	

Tahun 2018

Rancangan Rencana Kerja

/	2		3	4		5	7		8	9		10	11	12
	Program Aparatur	Peningkatan Displin		Jumlah pelanggaran pegawai negeri sipil	Jumlah pelanggaran pegawai negeri sipil		Program Aparatur	Peningkatan Displin		Jumlah pelanggaran pegawai negeri sipil	Jumlah pelanggaran pegawai negeri sipil			
III	I	Pengadaan pakaian khusus beserta perlengkapannya	Kuala Kapuas	Jumlah pakaian dinas yang disediakan (org)	Jumlah pakaian khusus yang disediakan (org)	0 %	I	Pengadaan pakaian khusus beserta perlengkapannya	Kuala Kapuas	Jumlah pakaian khusus yang disediakan (org)	Jumlah pakaian khusus yang disediakan (org)	0 %	37.200	
IV	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Kapasitas	Luar dan dalam daerah	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	62	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Kapasitas	Luar dan dalam daerah	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	62	37.200	
	I	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Luar dan dalam daerah	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (org)	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (org)	95 %	I	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Luar dan dalam daerah	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek (org)	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek (org)	95 %	100.000	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan	Kuala Kapuas	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan	Kuala Kapuas	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20	20.000	
	I	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Kuala Kapuas	Jumlah laporan capaian kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja	85 %	I	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Kuala Kapuas	Jumlah laporan capaian kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja	85 %	5.000	
	2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kuala Kapuas	Jumlah laporan capaian keuangan semesteran	Jumlah laporan capaian keuangan semesteran	85 %	2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kuala Kapuas	Jumlah laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	85 %	5.000	
	3	Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Kuala Kapuas	Jumlah laporan capaian prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan capaian prognosis realisasi anggaran	85 %	3	Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Kuala Kapuas	Jumlah laporan capaian prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan capaian prognosis realisasi anggaran	85 %	5.000	
	4	Penyusunan laporan akhir tahun	Kuala Kapuas	Jumlah laporan capaian akhir tahun	Jumlah laporan capaian akhir tahun	85 %	4	Penyusunan laporan akhir tahun	Kuala Kapuas	Jumlah laporan capaian akhir tahun	Jumlah laporan capaian akhir tahun	85 %	5.000	
VI	Program Peningkatan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Usaha	Kabupaten Kapuas	Persentase UMKM yang aktif	Persentase UMKM yang aktif	91 %	Program Peningkatan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Usaha	Kabupaten Kapuas	Persentase UMKM yang aktif	Persentase UMKM yang aktif	91 %	80.000	
	I	Penyusunan kebijakan tentang UKM	Kabupaten Kapuas	Tersedianya data WUB (bln)	Tersedianya data WUB (bln)	12	I	Penyusunan kebijakan tentang UKM	Kabupaten Kapuas	Tersedianya data WUB (bln)	Tersedianya data WUB (bln)	12	80.000	

Rancangan Rencana Kerja

Tahun 2018

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Kabupaten Kapuas	Cakupan UMKH binaan	91 %	165.000	Program Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Kabupaten Kapuas	Cakupan UMKH binaan	91 %	165.000	
	1 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Dalam dan luar daerah	Terlaksananya kegiatan temu usaha UMKH dengan usaha besar dan atau investor (kali)	1	30.000	1 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Kabupaten Kapuas	Terlaksananya kegiatan temu usaha UMKH dengan usaha besar dan atau investor	1	30.000	
	2 Fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksi	Luar Daerah	Jumlah pameran yang diikuti (kali)	2	60.000	2 Fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksi	Luar Daerah	Jumlah pameran yang diikuti (kali)	1	60.000	
	3 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Kabupaten Kapuas	Jumlah WUB yang terlatih	90	75.000	3 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Kabupaten Kapuas	Jumlah WUB yang terlatih	25	75.000	
VIII	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Kabupaten Kapuas	Jumlah dana yang disalurkan Pemerintah bagi UMKH (Rp. Milyar)	75.000.000	120.000	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Dalam dan luar daerah	Jumlah dana yang disalurkan Pemerintah bagi UMKH (Rp. Milyar)	75.000.000	120.000	
	1 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Kabupaten Kapuas	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan (kali)	1	25.000	1 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Kabupaten Kapuas	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan (kali)	-	25.000	
	2 Pengembangan klaster bisnis	Kabupaten Kapuas	Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	1	35.000	2 Pengembangan klaster bisnis	Kabupaten Kapuas	Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	1	35.000	
	3 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UKM dan koperasi	Kabupaten Kapuas	Jumlah rapat koordinasi dan kunjungan kerja (ta)	1	30.000	3 Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah	Kabupaten Kapuas	Jumlah rapat koordinasi dan kunjungan kerja (ta)	1	30.000	
	4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Kapuas	Jumlah monitoring yang dilaksanakan (bln)	12	30.000	4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Kapuas	Jumlah monitoring yang dilaksanakan (bln)	12	30.000	
IX	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Kabupaten Kapuas	Persentase koperasi aktif	95 %	275.000	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Kabupaten Kapuas	Persentase koperasi aktif	95 %	275.000	
	1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Kabupaten Kapuas	Jumlah rapat koordinasi dan kunjungan kerja (ta)	1	30.000	1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Kabupaten Kapuas	Jumlah rapat koordinasi dan kunjungan kerja (ta)	1	30.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Kabupaten Kapuas	Jumlah kegiatan pelatihan	2	160.000	2	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Jumlah kegiatan pelatihan	2	160.000	
3	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Kabupaten Kapuas	Jumlah KSP/USP-Kop yang dibina dan diawasi	20 KSP/ USP-KOP	30.000	3	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah KSP/USP-Kop yang dibina dan diawasi	20 KSP/ USP-KOP	30.000	
4	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Kabupaten Kapuas	Jumlah koperasi yang dibubarkan	5	25.000	4	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Jumlah peserta sosialisasi	5	25.000	
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Kapuas	Jumlah KSP/USP-Kop yang dibina dan diawasi	20 KSP/ USP-KOP	30.000	5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah KSP/USP-Kop yang dibina dan diawasi	20 KSP/ USP-KOP	30.000	
X	Program Perlindungan Konsumen dan Penganaman Perdagangan	Kabupaten Kapuas	Persentase komoditas perdagangan	80 %	150.000		Program Perlindungan Konsumen dan Penganaman Perdagangan	Persentase komoditas perdagangan	80 %	150.000	
1	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Luar daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diikuti (ta)	1	30.000	1	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Jumlah rapat koordinasi yang diikuti (ta)		30.000	
2	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Kabupaten Kapuas	Jumlah pengawasan yang dilaksanakan (bin)	12	20.000	3	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah pengawasan yang dilaksanakan (bin)	12	20.000	
3	Operasionalisasi dan pengembangan kemetrolagian daerah	Kecamatan Selat	Jumlah pelayanan tera dan tera ulang (kali)	1	100.000	4	Operasionalisasi dan pengembangan kemetrolagian daerah	Jumlah pelayanan tera dan tera ulang (kali)	1	100.000	
	- Kegiatan tera ulang alat ukur takar timbang dan kelengkapannya						- Kegiatan tera ulang alat ukur takar timbang dan kelengkapannya				
XI	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Kabupaten Kapuas	Ekspor bersih perdagangan (US\$)	45.000	540.000		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Ekspor bersih perdagangan (US\$)	45.000	540.000	
1	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Kabupaten Kapuas	Jumlah pameran yang dilaksanakan (kali)	3	510.000	1	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Jumlah pameran yang dilaksanakan (kali)	3	510.000	
	- Pameran hari jadi Kapuas	Kapuas		1	110.000				1	110.000	
	- Pameran Kalteng Expo	Palangka Raya		1	250.000				1	250.000	
	- Pameran Festival Borneo	Luar Daerah		1	150.000				1	150.000	

Tahun 2018

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas

Rancangan Rencana Kerja

Tahun 2018

1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
XV	Program peningkatan kemampuan teknologi industri		Kabupaten Kapuas	PPersentase industri yang menerapkan SNI	11 %		Program peningkatan teknologi industri		Kabupaten Kapuas	Persentase industri yang menerapkan SNI	11 %		
	I	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Kab. Kapuas	Jumlah pengrajin yang terlatih	30	40.000	I	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Kab. Kapuas	Jumlah pengrajin yang terlatih	30	40.000	
XVI	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial		Kabupaten Kapuas	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana sentra industri	83 %		Program pengembangan sentra-sentra industri potensial		Kabupaten Kapuas	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana sentra industri	83 %		
	I	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Kab. Kapuas	Jumlah gedung sentra yang dibangun	I	418.010	I	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Kab. Kapuas	Jumlah gedung sentra yang dibangun	I	418.010	
					Jumlah								
					6.117.000								6.117.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui proses Musrenbang sesuai dengan tahapan serta dengan mencermati program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Renstra SKPD. Tahapan selanjutnya adalah perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan monitoring yang menurut aturan dan ketentuan termasuk kemungkinan pelibatan unsur/pihak ketiga termasuk jasa konsultasi serta rekanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 9 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2018 KABUPATEN KAPUAS

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan los pasar desa RT 05	Desa mawar mekar Kec. Pulau Petak	Jumlah pasar yang dibangun	1 unit	
2	Pembangunan pasar	Palangkau lama Kec. Kapuas Murung	Jumlah pasar yang dibangun	1 unit	
3	Pelatihan kue basah dan kering	Kecamatan Kapuas Murung	Jumlah peserta pelatihan	25 org	
4	Pelatihan keterampilan dan kerajinan tangan	Kec. Kapuas Murung	Jumlah peserta pelatihan	25 org	Masuk dalam Renja 2018
5	Pembangunan pasar	Desa Dadahup Raya Kec. Dadahup	Jumlah pasar yang dibangun	1 unit	
6	Pembangunan pasar	Desa Sumber Alaska Kec. Dadahup	Jumlah pasar yang dibangun	1 unit	
7	Pembangunan kantin pasar	Desa Bungai Jaya Kec. Basarang	Jumlah pasar yang dibangun	1 unit	
8	Rehab bangunan pasar	Desa Lunuk Ramba Kec. Basarang	Jumlah pasar rehab	4 unit	
9	Bantuan dan permodalan (koperasi)	Desa Pangkalan Sari Kec. Basarang	Jumlah koperasi yang mendapat bantuan	2 Kop	
10	Pembangunan pasar desa	Desa Maju Bersama Kec. Kapuas Barat	Jumlah pasar yang dibangun	1 unit	
11	Pembangunan pasar desa	Desa Teluk Hiri Kec. Kapuas Barat	Jumlah pasar yang dibangun	1 unit	

Rancangan Rencana Kerja	Tahun 2018
-------------------------	------------

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Pembangunan pasar desa	Desa Sei Kayu Kec. Kapuas Barat	Jumlah pasar yang dibangun	1 unit	
13	Pembangunan pasar desa	Desa Penda Katapi Kec. Kapuas Barat	Jumlah pasar yang dibangun	1 unit	
14	Pelatihan kerajinan rotan dan hasil hutan lainnya	Desa Katimpun Kec. Mantangai	Jumlah peserta pelatihan	30 org	Masuk dalam Renja 2018
15	Penyertaan modal kelompok kerajinan tangan	Desa Lamunti Permai (A-1) Kec. Mantangai	Jumlah kelompok yang menerima bantuan	1 kel	
16	Pembentukan KUD	Desa Sumber Makmur Kec. Mantangai	Jumlah KUD yang dibentuk	1 unit	
17	Pembangunan pasar desa	Desa Tumbang Manyarung RT 2 Kec. Mandau Talawang	Jumlah pasar yang dibangun	1 unit	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. SEKTOR INDUSTRI

a. Arah dan Kebijakan Industri Nasional

Kemampuan industri mikro dan kecil belum memadai untuk dapat digunakan basis penumbuhan populasi industri berskala besar dan sedang. Padahal, untuk dapat meningkatkan produktivitas industri nasional salah satu jalan adalah dengan menumbuhkan industri yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Sehingga pengungkit utama akselerasi pertumbuhan industri adalah investasi baik dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) ataupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Oleh karena itu, arah kebijakan pertama adalah menarik investasi industri dengan menyediakan tempat industri tersebut dibangun, dalam arti tempat yang seluruh sarana prasarana yang dibutuhkan telah tersedia. Setelah itu baru kebijakan yang menyangkut arah penumbuhan populasi tersebut serta arah peningkatan produktivitasnya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 tertuang arah kebijakan pembangunan industri adalah sebagai berikut:

- 1) **Pengembangan Perwilayahan Industri** di luar Pulau Jawa: (1) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terutama yang berada dalam Koridor ekonomi ; (2) Kawasan Peruntukan Industri ; (3) Kawasan Industri; (4) Sentra IKM; (5) Kawasan Ekonomi Khusus; (6) Kawasan Berikat / *Export Processing Zone (EPZ)*; (7) Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ).

Strategi pengembangan perwilayahan industri adalah:

- a) Memfasilitasi pembangunan 13 Kawasan Industri (KI) yang mencakup: (1) Bintuni - Papua Barat; (2) Buli - Halmahera Timur-Maluku Utara; (3) Bitung – Sulawesi Utara, (4) Palu - Sulawesi Tengah; (5) Morowali - Sulawesi Tengah; (6) Konawe – Sulawesi Tenggara; (7) Bantaeng - Sulawesi Selatan; (8) Batulicin - Kalimantan Selatan; (9) Ketapang - Kalimantan Barat; (10) Landak – Kalimantan Barat, (11) Kuala Tanjung, Sumatera Utara, (12) Sei Mangke – Sumatera Utara; dan (13) Tanggamus, Lampung.
- b) Membangun Satu Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa.
- c) Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang terdiri dari 11 di Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur), dan 11 di Kawasan Barat Indonesia.
- d) Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur utama (jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pengolahan limbah,

dan logistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan (*Quality Working Life*) bagi pekerja.

- 2) **Penumbuhan Populasi Industri** dengan menambah paling tidak sekitar **9 ribu usaha** industri berskala besar dan sedang dimana 50% tumbuh di luar Jawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribu unit usaha.

Strategi utama penumbuhan populasi adalah dengan mendorong investasi baik melalui penanaman modal asing maupun modal dalam negeri, yang terdiri dari:

- a) Mendorong investasi untuk industri pengolah sumber daya alam, baik hasil pertanian maupun hasil pertambangan (hilirisasi), yaitu industri pengolah:
 - (i) Hasil-hasil **pertanian**/perkebunan yang mencakup industri pengolah minyak sawit (oleokimia), industri karet dan produk karet, industri cokelat, industri pangan, bahan penyegar, pakan, serta industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan lainnya.
 - (ii) Produk turunan **Migas** (petrokimia) yang mencakup industri petrokimia hulu, kimia organik, pupuk, garam, semen, resin sintetik dan bahan plastik, karet sintetik, serat tekstil, kimia penunjang pertahanan, plastik dan karet hilir, farmasi dan obat-obatan;
 - (iii) Mineral hasil **pertambangan** yang mencakup industri pengolahan dan pemurnian besi baja dasar, pengolahan dan pemurnian bukan besi (aluminium, tembaga, dan nikel), pembentukan logam (*metal forming*), logam untuk industri strategis, pengolahan logam tanah jarang (*rare earth metal*)
- b) Barang konsumsi kebutuhan dalam negeri yang utamanya industri padat tenaga kerja: industri mesin – permesinan, tekstil dan produk tekstil, alat uji dan kedokteran, alat transportasi, kulit dan alas kaki, alat kelistrikan, elektronika dan telematika.
- c) Penghasil bahan baku, bahan setengah jadi, komponen, dan sub-assembly (pendalaman struktur).
- d) Memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global baik sebagai perusahaan *subsidiary*, *contract manufacturer*, maupun sebagai *independent supplier* (*Integrasi ke Global Production Network*).
- e) Pembinaan industri kecil dan menengah (**Pembinaan IKM**) agar dapat terintegrasi dengan rantai nilai industri pemegang merek (*Original Equipment*

Manufacturer, OEM) di dalam negeri dan dapat menjadi basis penumbuhan populasi industri besar dan sedang.

Kebijakan investasi akan diarahkan untuk mengurangi efek negatif dominasi PMA dalam perekonomian nasional.

3) **Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas** (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja) dengan strategi sebagai berikut:

- a) Peningkatan Efisiensi Teknis
 - (i) Pembaharuan / revitalisasi permesinan industri
 - (ii) Peningkatan dan pembaharuan keterampilan tenaga kerja
 - (iii) Optimalisasi ke-ekonomian lingkup industri (*economic of scope*) melalui pembinaan klaster industri
- b) Peningkatan Penguasaan Iptek / Inovasi
 - (i) Infrastruktur mutu (*measurement, standardization, testing, and quality*)
 - (ii) Layanan perekayasa dan teknologi
 - (iii) Penyelenggaraan riset dan pengembangan teknologi
 - (iv) Penumbuhan entrepreneur berbasis inovasi teknologi (teknopreneur)
- c) Peningkatan Penguasaan dan Pelaksanaan Pengembangan Produk Baru (*New Product Development*) oleh industri domestik.
- d) Pembangunan Faktor Input
 - (i) Peningkatan kualitas SDM Industri
 - (ii) Akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau

Fasilitasi dan insentif dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas diutamakan industri: (1) strategis; (2) maritim; dan (3) padat tenaga kerja. Kebijakan fiskal terhadap impor bahan baku, komponen, barang setengah jadi diharmonisasikan sesuai dengan rantai pertambahan nilai berikutnya di dalam negeri.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian

- 1) Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa: (a) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terutama yang berada dalam Koridor ekonomi;

(b) Kawasan Peruntukan Industri; (c) Kawasan Industri; dan (d) Sentra IKM. Strategi pengembangan perwilayahan industri adalah:

- a. Memfasilitasi pembangunan 14 Kawasan Industri (KI) yang mencakup: (i) Bintuni - Papua Barat; (ii) Buli - Halmahera Timur-Maluku Utara; (iii) Bitung – Sulawesi Utara, (iv) Palu - Sulawesi Tengah; (v) Morowali - Sulawesi Tengah; (vi) Konawe – Sulawesi Tenggara; (vii) Bantaeng - Sulawesi Selatan; (viii) Batulicin - Kalimantan Selatan; (ix) Jorong - Kalimantan Selatan; (x) Ketapang - Kalimantan Barat; (xi) Landak – Kalimantan Barat, (xii) Kuala Tanjung, Sumatera Utara, (xiii) Sei Mangke – Sumatera Utara; dan (xiv) Tanggamus, Lampung.
 - b. Membangun paling tidak satu kawasan industri di luar Pulau Jawa.
 - c. Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang terdiri dari 11 di Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur), dan 11 di Kawasan Barat Indonesia.
 - d. Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur utama (jalan, listrik, air minum, telekomunikasi, pengolahan limbah, dan logistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan (*Quality Working Life*) bagi pekerja.
- 2) Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha industri berskala besar dan sedang dimana 50 persen tumbuh di luar Jawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribu unit usaha. Strategi utama penumbuhan populasi adalah dengan mendorong investasi baik melalui penanaman modal asing maupun modal dalam negeri, terutama pada:
- a. Industri pengolah sumber daya alam, yaitu industri pengolah :
 - i. Hasil-hasil pertanian/perkebunan yang mencakup industri pengolah minyak sawit (oleokimia), kemurgi, industri karet dan produk karet, industri cokelat, industri pangan termasuk industri gula, bahan penyegar, pakan, serta industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan lainnya.
 - ii. Produk turunan Migas (petrokimia) yang mencakup industri petrokimia hulu, kimia organik, pupuk, garam, semen, resin sintetis dan bahan plastik,

- karet sintetik, serat tekstil, kimia penunjang pertahanan, plastik dan karet hilir, farmasi dan obat-obatan;
- iii. Mineral hasil pertambangan yang mencakup industri pengolahan dan pemurnian besi baja dasar, pengolahan dan pemurnian bukan besi (aluminium, tembaga, dan nikel), pembentukan logam, logam untuk industri strategis, pengolahan logam tanah jarang.
- b. Industri penghasil barang konsumsi kebutuhan dalam negeri yang padat tenaga kerja: industri mesin – permesinan, tekstil dan produk tekstil, alat uji dan kedokteran, alat transportasi, kulit dan alas kaki, alat kelistrikan, elektronika dan telematika.
- c. Industri penghasil bahan baku, bahan setengah jadi, komponen, dan *sub-assembly* (pendalaman struktur).
- d. Industri yang memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global baik sebagai perusahaan *subsidiary*, *contract manufacturer*, maupun sebagai pemasok independen (*Global Production Network*). Di samping itu, Industri Kecil dan Menengah (IKM) akan dibina agar dapat terintegrasi dengan rantai nilai industri pemegang merek (*Original Equipment Manufacturer*, OEM) di dalam negeri dan menjadi basis penumbuhan populasi industri besar/sedang.
- 3) Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja) dengan strategi sebagai berikut:
- a. Peningkatan Efisiensi Teknis
1. Pembaharuan/revitalisasi permesinan industri;
 2. Peningkatan dan pembaharuan keterampilan tenaga kerja;
 3. Optimalisasi keekonomian lingkup industri (*economic of scope*) melalui pembinaan klaster industri.
- b. Peningkatan Penguasaan Iptek/Inovasi
1. Infrastruktur mutu (*measurement, standardization, testing, and quality*);
 2. Layanan perekayasaan dan teknologi;
 3. Penyelenggaraan riset dan pengembangan teknologi;
 4. Penumbuhan *entrepreneur* berbasis inovasi teknologi (*teknopreneur*).
- c. Peningkatan Penguasaan dan Pelaksanaan Pengembangan Produk Baru (*New Product Development*) oleh industri domestik.

d. Pembangunan Faktor Input

1. Peningkatan kualitas SDM Industri;
2. Akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau.

Fasilitasi dan pemberian insentif dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas diprioritaskan pada: (1) industri strategis menurut Kebijakan Industri Nasional; (2) industri maritim; dan (3) industri padat tenaga kerja. Kebijakan fiskal terhadap impor bahan baku, komponen, barang setengah jadi diharmonisasikan sesuai dengan rantai pertambahan nilai berikutnya di dalam negeri. pemegang merek (*Original Equipment Manufacturer*, OEM) di dalam negeri dan menjadi basis penumbuhan populasi industri besar / sedang.

3.1.2. SEKTOR PERDAGANGAN

a. Arah dan Kebijakan Nasional di Sektor Perdagangan

Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan akan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 serta bertumpu pada keseimbangan antara pembangunan perdagangan dalam negeri dan pembangunan perdagangan luar negeri. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang domestik serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

Pengembangan kapasitas perdagangan nasional dilakukan melalui dua pilar arah kebijakan, yaitu: (1) pengembangan perdagangan dalam negeri dan (2) pengembangan perdagangan luar negeri. Kedua kebijakan ini dilakukan secara sinergis dan inklusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berkeadilan.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menetapkan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan sektor perdagangan antara lain, yaitu perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan.

Arah kebijakan pembangunan Perdagangan Nasional kedepan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2015-2019. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun langkah-langkah strategis kedepan untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi 8 (delapan) pokok pikiran, yaitu :

- 1) Mengamankan pangsa ekspor dipasar utama
- 2) Memperluas pangsa pasar ekspor dipasar prospektif dan hubungan perdagangan internasional
- 3) Meningkatkan diversifikasi produk ekspor
- 4) Mengamankan pasar domestic untuk meningkatkan daya saing produk nasional
- 5) Meningkatkan aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- 6) Meningkatkan perlindungan konsumen
- 7) Meningkatkan efisiensi system distribusi dan logistic
- 8) Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha perdagangan

Prioritas Nasional Bidang Perdagangan Luar Negeri

Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun kedepan sesuai dengan yang tertuang didalam RPJMN 2015-2019 adalah “Meningkatkan daya saing produk ekspor non-migas dan jasa”

Strategi yang perlu dilakukan dalam pembangunan perdagangan luar negeri selama periode 2015-2019 adalah :

1. Menjaga dan meningkatkan pangsa pasar produk Indonesia dipasar ekspor utama (*market maintenance*).
2. Meningkatkan pangsa pasar ekspor dipasar prospektif (*market creation*).
3. Mengidentifikasi peluang pasar ekspor produk dan jasa potensial (*Product creation*)
4. Meningkatkan fasilitasi ekspor dan impor untuk mendukung daya saing produk nasional (*export facilitation and import management*)

Prioritas Nasional Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Arah kebijakan pembangunan perdagangan dalam neger dalam RPJMN 2015-2019 adalah : “Meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri yang lebih efisien dan berkeadilan”.

Strategi yang perlu dilakukan dalam periode 2015-2019 adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga.
2. Meningkatkan kualitas sarana perdagangan (terutama pasar rakyat)
3. Meningkatkan aktivitas perdagangan antar wilayah di Indonesia
4. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil menengah.
5. Meningkatkan iklim usaha perdagangan konvensional dan non konvensional.
6. Mendorong penggunaan produk domestik
7. Meningkatkan perlindungan konsumen
8. Menerapkan standar nasional Indonesia (SNI) secara konsisten
9. Meningkatkan efektivitas pengelolaan impor untuk menjaga stabilitas pasar domestik
10. Mendorong perdagangan berjangka komoditi
11. Mendorong pengembangan sistem resi gudang dan pasar lelang
12. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang perdagangan

3.1.3. SEKTOR KOPERASI UMKM

a. Arah dan Kebijakan Nasional di Sektor Koperasi

Berdasarkan sasaran pembangunan nasional periode 2015-2019, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional adalah :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan.
3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim.
5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.
7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koperasi dan UKM

Dengan memperhatikan tantangan dan sasaran pengembangan koperasi dan UMKM ke depan, dan merujuk pada arah kebijakan nasional dan di bidang UMKM dan koperasi tahun 2015-2019, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk:

“Meningkatkan produktivitas, kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar (“naik kelas”) dan berdaya saing”

Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui lima strategi sebagaimana dituangkan dalam RPJMN tahun 2015-2019 yaitu (i) peningkatan kualitas sumber daya manusia; (ii) peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; (iii) peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran; (iv) penguatan kelembagaan usaha; dan (v) kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja dari suatu organisasi.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Berdasarkan hal yang berpangkal kepada visi, misi dan faktor-faktor penentu keberhasilan yang telah digariskan maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan I :

Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta peran kelembagaan Dinas Perindagkop UMKM Kab. Kapuas. Ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia/aparatur
2. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja dan keuangan

Tujuan II :

Menumbuhkan kemitraan usaha bagi koperasi dan UMKM dalam daerah, luar daerah, dalam negeri dan luar negeri. Ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/besar dan IKM
2. Meningkatnya jumlah usaha kecil dan menengah

Tujuan III :

Meningkatkan daya saing pada era globalisasi dengan memantapkan kelembagaan, meningkatkan dan mengembangkan sistem pendukung usaha bagi KUKM. Ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan yang mempunyai peringkat A/sehat
2. Meningkatnya jumlah koperasi dan UKM yang menerima bantuan modal

Tujuan IV :

Mewujudkan kemitraan dengan lembaga swasta dan pelaku usaha yang sinergi dan berkesinambungan. Ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah dana yang disalurkan BPR/LKM/BUMN kepada koperasi dan UKM

Tujuan V :

Meningkatkan pengembangan industri kecil dan menengah yang menggunakan bahan baku produk lokal. Ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya industri pengguna bahan baku produk lokal
2. Meningkatnya volume, nilai dan jenis komoditi ekspor
3. Meningkatnya perijinan usaha
4. Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan konsumen

Tabel 10 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta peran kelembagaan Dinas Perindagkop UMKM Kab. Kapuas	1 Meningkatkan sumber daya manusia/aparaturnya kompetensi	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	8	8	15	18	20
		2 Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen yang disusun	8	8	8	8	8
2	Menumbuhkan kemitraan usaha bagi koperasi dan UMKM dalam daerah, luar daerah, dalam negeri dan luar negeri.	1 Meningkatkan jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/besar dan IKM	Jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/besar dan IKM	5	10	15	20	25
		2 Meningkatkan jumlah usaha kecil dan menengah	Jumlah usaha kecil dan menengah	2078	2118	2159	2204	2255
3	Meningkatkan daya saing pada era globalisasi dengan memantapkan kelembagaan, meningkatkan dan mengembangkan pendukung usaha bagi KUKM	1 Bertambahnya jumlah koperasi aktif dan yang mempunyai peringkat A/sehat	Jumlah koperasi aktif yang mempunyai peringkat A/sehat	398	408	423	443	450
		2 Meningkatkan jumlah koperasi dan UMKM yang menerima bantuan modal	Jumlah koperasi dan UMKM yang menerima bantuan modal	30	35	40	50	60
4	Mewujudkan kemitraan dengan lembaga swasta dan pelaku usaha yang sinergi dan berkesinambungan	1 Meningkatkan jumlah dana yang disalurkan BPR/LKM/BUMN kepada koperasi dan UMKM	Jumlah dana yang disalurkan BPR/LKM/BUMN kepada koperasi dan UMKM meningkat	58.745.111	65.992.111	70.326.614	75.289.111	80.377.111

Rancangan Rencana Kerja	Tahun 2018
-------------------------	------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
5	Meningkatkan pengembangan industri kecil dan menengah yang menggunakan bahan baku produk lokal serta penataan struktur industri	1	Meningkatnya industri pengguna bahan baku produk lokal	Jumlah industri menggunakan bahan baku produk lokal meningkat	248	252	260	267	267
				Jumlah industri UKM meningkat	330	335	340	345	350
				Jumlah ijin industri meningkat	50	65	75	125	125
		2	Meningkatnya volume, nilai dan jenis komoditi ekspor	Nilai ekspor meningkat	36.000.000,00	37.000.000,00	40.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00
				Volume ekspor meningkat (Ton)	11.000	12.000	15.000	20.000	30.000
		3	Meningkatnya perijinan usaha	Jumlah ijin usaha meningkat	150	155	160	165	170
				Jumlah pedagang kecil menengah dan besar meningkat	150	155	160	165	170
		4	Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan konsumen	Jumlah pengawasan barang beredar	4	4	4	4	4

3.3. Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2017 nanti Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas merencanakan akan melaksanakan sebanyak 16 (enam belas) program yang didukung oleh 60 (enam puluh) kegiatan dengan rincian yaitu : 5 (lima) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan merupakan urusan rutin sedangkan 11 (sebelas) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan merupakan urusan pilihan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas. Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan di dukung 13 kegiatan, yaitu :

- 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
- 1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- 1.6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- 1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 1.8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 1.9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan;
- 1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- 1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan di Dukung 5 (lima) Kegiatan, yaitu :

- 2.1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 2.2 Pengadaan peralatan gedung kantor
- 2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- 2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- 2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler

3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur didukung 1 (satu) kegiatan, yaitu :**
 - 3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan di Dukung 1 (satu) Kegiatan, yaitu :**
 - 4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Anggaran dan Keuangan dengan di Dukung 4 (empat) Kegiatan, yaitu :**
 - 5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 5.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
 - 5.3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
 - 5.4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6. **Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah dan Koperasi yang Kondusif dengan di Dukung 1 (satu) Kegiatan, yaitu :**
 - 6.1 Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil dan menengah
7. **Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan di Dukung 3 (lima) Kegiatan, yaitu :**
 - 7.1 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - 7.2 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi;
 - 7.3 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
8. **Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah didukung 4 (empat) kegiatan, yaitu:**
 - 8.1 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan;
 - 8.2 Pengembangan klaster bisnis
 - 8.3 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah;
 - 8.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan di Dukung 4 (empat) Kegiatan, yaitu :

- 9.1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi;
- 9.2 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian
- 9.3 Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
- 9.4 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
- 9.5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

10. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan di Dukung 3 (tiga) Kegiatan, yaitu :

- 10.1 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen;
- 10.2 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
- 10.3 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

11. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan di Dukung 3 (tiga) Kegiatan, yaitu :

- 11.1 Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri;
- 11.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan perdagangan.

12. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan di Dukung 4 (empat) Kegiatan, yaitu :

- 12.1 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
- 12.2 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk; (DAK)
- 12.3 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk; (APBD)
- 12.4 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk;

13. Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi dengan didukung 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- 13.1 Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi
- 13.2 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas

14. Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan didukung 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- 14.1 Pembinaan industri kecil menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri;
- 14.2 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah

15. Program peningkatan kemampuan teknologi industri dengan didukung 1 (satu) kegiatan, yaitu :

- 15.1 Pembinaan kemampuan teknologi industri

16. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial dengan didukung 1 (satu) kegiatan, yaitu :

- 16.1 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

BAB IV PENUTUP

1. Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.
2. Dalam pengembangan usaha dibidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah diperlukan iklim usaha yang kondusif di daerah guna pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kapuas, dengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah.
3. Peningkatan sarana dan prasarana di daerah harus dilaksanakan secepatnya dalam membuka keterisolasian daerah pedalaman guna mendukung dan mempercepat realisasi investasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi regional.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mengembangkan kewirausahaan dan profesionalisme para pengelola koperasi dan sektor usaha lainnya.
5. Perluasan dan Pengembangan akses informasi, teknologi, modal dan pasar sehingga berpengaruh terhadap peningkatan volume usaha, produktifitas dan daya saing para pengusaha skala mikro, kecil menengah dan koperasi.
6. Peningkatan lembaga penyedia jasa yang melayani pengusaha skala mikro kecil menengah dan koperasi (PMKMK).
7. Peningkatan koordinasi antar lembaga / badan yang mengembangkan program pembinaan pengusaha menengah kecil dan koperasi (PMKK).
8. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perdagangan,

Perindustrian, Koperasi dan UKM. Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang.

Kuala Kapuas, Januari 2017

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kapuas,



H. SUPARMAN, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641113 198702 1 002